



STRATEGI PENCAPAIAN TARGET SDGS SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI DI KAWASAN TELUK TOMINI

STUDI KASUS DI KABUPATEN BANGGAI

Disusun Oleh:

EDUART WOLOK
IDHAM H. LAHAY
ZULKIFLI TANIPU

KATA PENGANTAR

Dengan penuh semangat dan kebanggaan, saya dengan senang hati mempersembahkan buku ini kepada Anda. Buku ini menggali secara mendalam tentang Strategi Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) sebagai landasan krusial dalam pengembangan Kawasan Ekonomi di Kawasan Teluk Tomini, khususnya di wilayah Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasil penelitian tahap I telah terdapat baseline data pencapaian target SDGs di 11 daerah yang berada di kawasan Teluk Tomini, dari baseline data tersebut terdapat indikator SDGs dari 17 goals SDGs yang belum mencapai target nasional dan daerah berdasarkan metadata SDGs Edisi II terutama untuk kategori C (lebih dari seperempat jalan menuju target SDGs), D (kurang dari seperempat jalan menuju target SDGs), dan E (masih jauh dari pencapaian target SDGs). Sebagai tindak lanjut dari penelitian tahap 1 ini adalah perlunya analisis menggunakan pendekatan AHP dan IPA untuk mengetahui permasalahan atau kelemahan setiap daerah lokasi penelitian dalam pencapaian target SDGs.

Analisis kepentingan menjadi bagian integral dalam paparan ini. Kami tidak hanya menguraikan langkah-langkah strategis, tetapi juga menggali makna yang lebih dalam di balik setiap upaya. Dari peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga pelestarian lingkungan, setiap langkah memiliki dampak yang signifikan bagi kawasan ini.

Melalui pembacaan buku ini, saya mengundang Anda untuk menjelajahi beragam perspektif tentang pentingnya pencapaian SDGs sebagai fondasi utama dalam pembangunan kawasan. Dari sudut pandang ekonomi, sosial, hingga lingkungan, buku ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana pengembangan Kawasan Ekonomi di Teluk Tomini dapat menjadi cerminan dari kesungguhan kita dalam meraih tujuan berkelanjutan.

Dalam perjalanan ini, peran Anda sebagai pembaca sangatlah penting. Dari setiap halaman yang dibaca hingga gagasan yang dipertimbangkan, Anda turut serta membentuk pandangan yang lebih luas dan berkelanjutan tentang masa depan kawasan ini.

Akhir kata, izinkanlah saya untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses penulisan buku ini, serta kepada Anda, pembaca yang setia, yang telah memilih untuk meluangkan waktu membaca karya ini. Semoga buku ini tidak hanya memberikan wawasan yang berharga, tetapi juga menjadi inspirasi bagi langkah-langkah nyata dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kawasan Teluk Tomini, terutama di wilayah Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Salam hangat,

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	2
BAB II KABUPATEN BANGGAI.....	6
BAB III HASIL PENELITIAN SDGs TAHAP 1	10
3.1 Pilar Sosial	10
3.2 Pilar Ekonomi	18
3.3 Pilar Lingkungan.....	27
3.4 Pilar Hukum dan Tata Kelola	31
3.5 Hasil Pemetaan Kategori Capaian Indikator SDGs (Berdasarkan SDGs Tahap 1) ..	25
A. Pilar Sosial	25
B. Pilar Ekonomi.....	26
C. Pilar Lingkungan.....	29
D. Pilar Hukum dan Tata Kelola	31
BAB IV ANALISIS HIERARCHY PROCESS	29
4.1 Hasil Pemetaan berdasarkan <i>Analitycal Hierarchy Process</i> (AHP).....	29
4.2 Rekomendasi.....	33
BAB V IMPORTANT PERFORMANCE ANALYSIS	35
5.1 Pengolahan Kartesian IPA	35
5.2 Rekomendasi.....	36
BAB VI PENUTUP.....	37
6.1 Kesimpulan	37
6.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA.....	39
LAMPIRAN.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Persentase Penduduk Miskin P1, P2 Kab. Banggai 2020 - 2022.....	9
Tabel 2.2 Skala Penilaian	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian Tahun 2023	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2 Kuesioner Perbandingan Berpasangan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.1 Indikator Pilar Sosial	25
Tabel 4.2 Indikator Pilar Ekonomi	26
Tabel 4.3 Indikator Pilar Lingkungan.....	29
Tabel 4.4 Matriks Perbandingan Berpasangan	29
Tabel 4.5 Penjumlahan Matriks.....	30
Tabel 4.6 Normalisasi Matriks	30
Tabel 4.7 Bobot Prioritas.....	31
Tabel 4.8 Perkalian setiap nilai cell dengan bobot prioritas.....	31
Tabel 4.9 Hasil penjumlahan setiap baris	31
Tabel 4.10 Hasil Penjumlahan Baris Dibagi Dengan Elemen Prioritas Baris.....	32
Tabel 4.11 Nilai Indeks Random.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Luas wilayah (km ²) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.	6
Gambar 2.2 Road Map Penelitian untuk Tahun 2022-2024.	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.1 Hierarki Pemilihan Keputusan.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.2 Analisis Kuadran (Importance-Performance Analysis)..	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.4 Diagram Tahapan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.1 Hierarki Pemilihan Keputusan.....	29

BAB I PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *sustainable development goals* (SDGs) merupakan agenda negara-negara dunia yang ditetapkan pada bulan September 2015, di Sidang Umum PBB untuk menjadi agenda Global 2030 dan harus dilaksanakan oleh seluruh negara di dunia, termasuk oleh Indonesia. SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, dengan prinsip universal, terintegrasi antar dimensi, inklusif dan *no one left behind*, serta mencakup sarana pelaksanaan.

Untuk itu Pemerintah Indonesia menerbitkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan SDGs yang mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB/SDGs harus disusun 3 (tiga) dokumen perencanaan, yaitu: Peta Jalan TPB/SDGs, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi. Untuk menyusun Rencana Aksi TPB/SDGs tersebut telah disusun pedoman sebagai panduan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun di daerah sehingga dihasilkan rencana aksi TPB/SDGs yang terukur dan jelas dalam periode waktu tertentu. Ini artinya bahwa dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) maka dibutuhkan berbagai analisis secara ilmiah yang dapat membantu pemerintah dalam menentukan arah rencana aksi yang tepat sasaran dalam mencapai target dan indikator dari 17 *goals* SDGs.

SDGs sebagai komitmen internasional ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Adapun 17 *goals* SDGs baik secara global maupun nasional yang tertuang dalam Perpres No.59 Tahun 2017 adalah; 1) tanpa kemiskinan; 2) tanpa kelaparan; 3) kehidupan sehat dan sejahtera; 4) pendidikan berkualitas; 5) kesetaraan gender; 6) air bersih dan sanitasi layak; 7) energi bersih dan terjangkau; 8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; 9) industri, inovasi dan infrastruktur; 10) berkurangnya kesenjangan; 11) kota dan permukiman yang berkelanjutan; 12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; 13) penanganan perubahan iklim; 14) ekosistem lautan; 15) ekosistem daratan; 16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan 17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan metadata SDGs yang diterbitkan oleh kementerian PPN/Bappenas edisi 2 Tahun 2020 bahwa 17 *goals* SDGs memiliki 124 target dan 289 indikator yang dikelompokkan dalam 4 (empat) pilar yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata

kelola. Keempat pilar ini tidak terpisahkan dalam rumusan RAD SDGs provinsi sehingga perlu kajian kesiapan dan arah aksi daerah untuk mengimplementasikan program berbasis SDGs. Analisis setiap pilar pembangunan menjadi landasan untuk memotret data yang mengindikasikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan setiap daerah yang searah dengan RPJMN 2020-2024. Adapun empat dokumen pilar SDGs yaitu;

1. Pilar Pembangunan Sosial. Pilar ini terdiri dari 5 goals yaitu *goals* 1, 2, 3, 4, 5 tentang:
1) tanpa kemiskinan; 2) tanpa kelaparan; 3) kehidupan sehat dan sejahtera; 4) pendidikan berkualitas; dan 5) kesetaraan gender.
2. Pilar Pembangunan Ekonomi. Pilar ini meliputi 5 goals yaitu *goal* 7 tentang Energi Bersih dan Terjangkau; *goal* 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; *goal* 9 tentang industri, inovasi dan infrastruktur; *goal* 10 tentang berkurangnya kesenjangan; dan *goal* 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan.
3. Pilar Pembangunan Lingkungan. Pilar ini meliputi 6 goals yaitu *goal* 6 tentang air bersih dan sanitasi layak, *goal* 11 tentang kota dan permukiman yang berkelanjutan, *goal* 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, *goal* 13 tentang penanganan perubahan iklim, *goal* 14 tentang ekosistem lautan, dan 15 tentang ekosistem daratan.
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yang meliputi satu goal yaitu *goal* 16 tentang perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.

Analisis setiap pilar pembangunan didasarkan pada metadata yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) edisi II pada Tahun 2020. Metadata ini menjadi panduan seluruh daerah di Indonesia termasuk di Kawasan Teluk Tomini sehingga memiliki sistem evaluasi yang sama untuk mengukur kesiapan dan juga ketercapaian setiap daerah dalam pencapaian target dan indikator SDGs di daerah dan nasional.

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan definisi *International Hydrographic Organization* (IHO) bahwa Teluk Tomini merupakan salah satu perairan Kepulauan Hindia Timur dengan batas timurnya adalah batas Barat Laut Maluku yakni Tanjung Pasir Panjang dan Tanjung Tombalilatu. Teluk ini berada di Pulau Sulawesi dengan luas sekitar $\pm 6.000.000$ Ha, dilewati garis katulistiwa serta berada pada garis *Wallace-Weber* dengan sifat perairan tergolong perairan semi tertutup (*semi enclosed*) yang bersinggungan langsung dengan tiga provinsi yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Gorontalo.

Posisi geografis ini menjadikan Kawasan Teluk Tomini memiliki kekayaan flora dan fauna beraneka ragam baik di darat maupun di laut. Oleh karena itu teluk ini dikenal sebagai bagian segitiga terumbu karang dunia (*Coral Triangle*) yang juga memiliki Taman Nasional Laut di Kepulauan Togean sebagai “*the Heart of Coral Triangle*” yang menjadi kawasan wisata yang setiap saat ramai dikunjungi wisatawan asing. Bahkan UNESCO menetapkan bahwa Teluk Tomini sebagai sebagai salah satu kekayaan dunia yang patut dilindungi, dan pemerintah Indonesia menetapkan bahwa ekosistem Teluk Tomini merupakan salah satu 26 kawasan andalan laut nasional yang memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang sangat melimpah. Untuk itu pada Tahun 2003, Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa kawasan Teluk Tomini sebagai gerbang Mina Bahari.

Namun bonus potensi kekayaan alam yang sangat melimpah dan strategis di tiga provinsi dan bahkan dengan Maluku Utara ini ternyata belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di berbagai sektor di kawasan Teluk Tomini. Seharusnya kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah dan beraneka ragam di kawasan Teluk Tomini menjadi potensi besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam mengatasi kemiskinan tanpa meninggalkan budaya dan kearifan lokal. Untuk itu pada Tahun 2008, pemerintah Indonesia melalui Menteri Negara Percepatan Daerah telah meluncurkan Program Percepatan Pembangunan Kawasan Teluk Tomini.

Upaya percepatan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Teluk Tomini, ternyata belum mampu menurunkan angka kemiskinan di kawasan ini hingga di bawah 10 %. Hal ini dibuktikan dengan data BPS tentang angka kemiskinan di tahun 2022, di mana dari 10 provinsi termiskin ternyata 2 provinsi terdapat di kawasan Teluk Tomini yaitu Provinsi Gorontalo peringkat ke-5 (15,51%) dan Provinsi Sulawesi Tengah peringkat ke-9 (12,30 %) sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Meskipun demikian dari jumlah penduduk yang termiskin justru terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sekitar 387,71 ribu jiwa dibandingkan Provinsi Gorontalo yaitu sekitar 187,35 ribu jiwa pada September 2022. Sedangkan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki angka kemiskinan di bawah 10 % yaitu sekitar 7,34% di bulan September 2022, namun jumlah penduduk miskin tidak berbeda jauh dengan Provinsi Gorontalo yaitu sekitar 187,33 ribu jiwa.

Kondisi ini menjadi fokus perhatian UNG sebagai salah satu universitas yang unggul di Kawasan Teluk Tomini untuk mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus di kawasan Teluk Tomini sebagai program unggulan yang perlu didukung dengan strategi perencanaan yang berbasis data *sustainable development goals* (SDGs). Program unggulan UNG ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional Indonesia yang menelaraskan

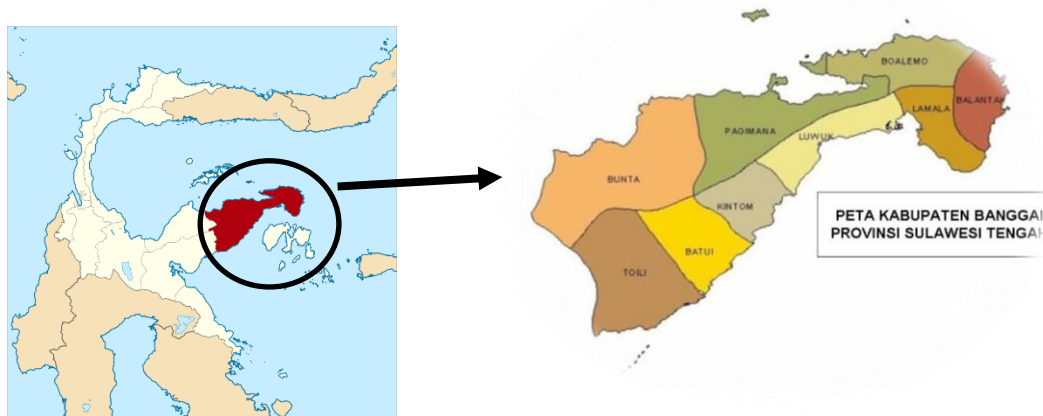
capaian pembangunan dengan 17 tujuan SDGs demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan yang dipertegas dengan PERPRES No. 59 Tahun 2017 dan lebih dipertegas lagi dengan PERPRES NO. 111 Tahun 2022. Perpres ini menegaskan bahwa dalam kerangka pembangunan nasional harus dan mutlak mengintegrasikan indikator SDGs dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional daerah. Ini artinya bahwa upaya pengembangan kawasan ekonomi khusus di kawasan Teluk Tomini seperti di Kabupaten Banggai perlu didukung dengan langkah strategi yang sinergi dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD pemerintah Kabupaten Banggai

Oleh karena itu salah satu langkah yang ditempuh oleh UNG adalah melakukan penelitian yang fokus untuk memetakan baseline data pencapaian target SDGs di kawasan Teluk Tomini untuk 4 pilar SDGs yaitu pilar ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Temuan hasil penelitian ini dapat memberikan landasan bagi UNG untuk dapat menyusun desain strategis pengembangan kawasan ekonomi di Teluk Tomini yang searah dengan target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Disamping itu manfaat bagi pemerintah daerah adalah menjadi bahan evaluasi dalam menentukan arah kebijakan yang strategis sesuai isu potensi daerah demi menghapus kemiskinan sekaligus untuk mewujudkan masyarakat sejahtera seperti yang ditargetkan SDGs.

Hasil penelitian tahap I telah terdapat baseline data pencapaian target SDGs di 11 daerah yang berada di kawasan Teluk Tomini. Namun dari baseline data tersebut terdapat indikator SDGs dari 17 goals SDGs yang belum mencapai target nasional dan daerah berdasarkan metadata SDGs Edisi II terutama untuk kategori C (lebih dari seperempat jalan menuju target SDGs), D (kurang dari seperempat jalan menuju target SDGs), dan E (masih jauh dari pencapaian target SDGs). Sebagai tindak lanjut dari penelitian tahap I ini adalah perlunya *analysis SWOT* untuk mengetahui permasalahan atau kelemahan dan tantangan setiap daerah lokasi penelitian dalam pencapaian target SDGs. Disamping itu permasalahan dan tantangan, setiap daerah pasti memiliki potensi sumber daya alam yang perlu dipetakan sebagai kekuatan dan peluang untuk pencapaian target-target SDGs baik pada pilar sosial, ekonomi, lingkungan maupun hukum dan tata kelola. Oleh karena itu dalam penelitian tahap ke-2 ini difokuskan pada analisis SWOT pencapaian target SDGs sesuai dengan dengan indikator SDGs yang masih kategori C, D dan E. Dengan demikian temuan ini juga menjadi salah satu referensi bagi pemerintah untuk merumuskan strategi pencapaian target pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam RPJMD dengan indikator kinerja utama

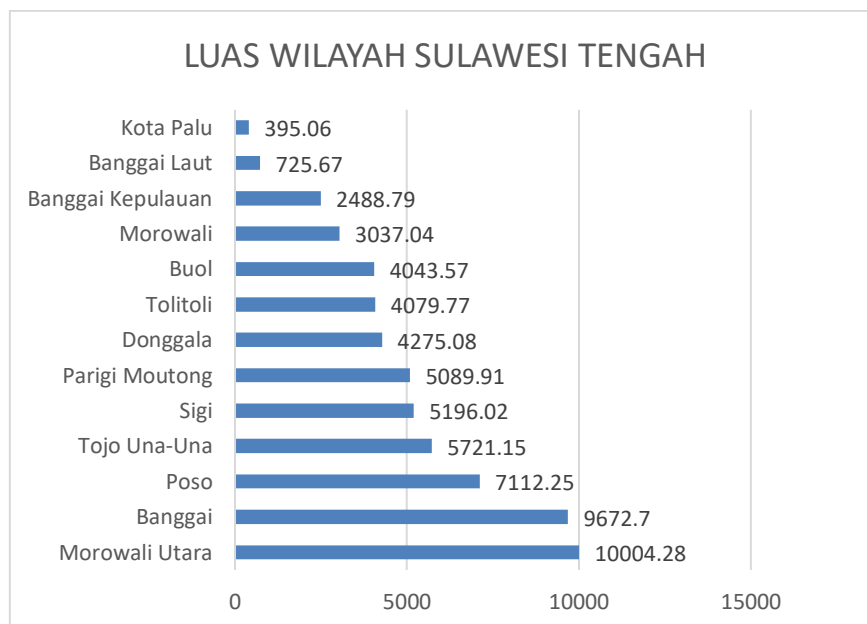
(*Key Performance Indicators*) atau IKU yang dirumuskan sesuai kondisi daerah masing-masing.

BAB II KABUPATEN BANGGAI



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Banggai

Kawasan Teluk Tomini merupakan salah satu teluk besar di Indonesia dengan potensi alam yang melimpah. Teluk ini berada di antara tiga provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo yang seharusnya menjadi kawasan strategis dalam mewujudkan masyarakat sejahtera secara berkelanjutan. Bahkan pada Tahun 2003 teluk ini ditetapkan sebagai pintu gerbang Mina Bahari dan selanjutnya pada Tahun 2008 diluncurkan program percepatan pembangunan kawasan Teluk Tomini secara berkelanjutan. Posisi geografis Teluk Tomini yang berada di garis katulistiwa dan sekaligus berada di Zona Wallacea ini menyimpan keindahan dan potensi alam yang unik dan sangat melimpah baik secara sosial, ekonomi dan lingkungan yang dapat menunjang pembangunan daerah secara berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya.



Gambar 2.2 Luas wilayah (km²) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

(Sumber: <https://sulteng.bps.go.id/luas-wilayah-menurut-kabupaten-kota.html>)

Sebelum terbentuknya daerah otonom Banggai, wilayah Banggai merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Banggai yang berpusat di Pulau Banggai. Kerajaan ini mendapat pengaruh dari luar melalui ikatan persahabatan, perdagangan dan tali perkawinan dengan Kerajaan Ternate dan Kerajaan Gowa, bahkan telah pula menjalin hubungan dengan bangsa luar seperti Portugis dan VOC Belanda. Pada mulanya hubungan tersebut masih bersifat lunak dalam bentuk hubungan dagang, tetapi makin lama hubungan tersebut makin mengikat dengan berbagai perjanjian. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh bangsa luar untuk menaklukkan Kerajaan Banggai.

Pada masa awal zaman Pemerintahan Belanda awal Abad XX, Pulau Sulawesi dibagi atas dua provinsi yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Setiap provinsi dibagi menjadi afdeling dan setiap afdeling dibagi menjadi onder afdeling serta setiap onder afdeling terdiri dari beberapa kerajaan. Banggai sendiri merupakan wilayah onder afdeling dalam wilayah afdeling Poso di wilayah Keresidenan Koordinator Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada masa pertengahan dekade 1950-an, ide pembentukan Kabupaten Banggai dimulai dengan tuntutan beberapa partai politik bersama-sama dengan Organisasi Kerukunan Pelajar (OKP) saat itu. Tuntutan tersebut disuarakan lewat saluran formal DPRD di Poso, dimana melalui wakil swapraja dibentuklah Badan Penuntut Daerah Otonom (BPOD) pada tanggal 17 Pebruari 1956 yang anggotanya terdiri dari tokoh partai politik dan unsur Pemerintah Swapraja Banggai.

Selanjutnya BPOD inilah yang mengirim delegasi ke pusat untuk memperjuangkan status daerah otonomi Tingkat II Banggai. Maka pada tanggal 4 Juli 1959, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, wilayah onderafdeling Banggai yang meliputi seluruh bekas wilayah Swapraja Banggai sebagai bagian dari daerah afdeling Poso, dinyatakan berdiri sendiri sebagai daerah swatantra tingkat II, dengan nama “Daerah Tingkat II Banggai” dengan kedudukan pemerintahan berada di Luwuk.

Pada tanggal 12 Desember 1959 dilakukan serah terima pemerintahan dari raja terakhir Kerajaan Banggai, Syukuran Aminuddin Amir selaku Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Banggai di Luwuk kepada Bidin selaku bupati pertama Daerah Tingkat II Banggai. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 47 tanggal 13 Desember 1960, Daerah Tingkat II Banggai termasuk pada Propinsi Sulawesi Utara-Tengah. Pada masa ini wilayah

Daerah Tingkat II Banggai dibagi ke dalam 2 (dua) Wedana yang disesuaikan dengan kondisi geografis, sebagai berikut:

A. Kewedanan Banggai yang berkedudukan di Luwuk, terdiri atas :

Kecamatan Luwuk meliputi 5 (lima) distrik masing-masing: Distrik Luwuk, Kintom, Batui, Lamala dan Balantak, dengan pusat kedudukan di Luwuk. Kecamatan Pagimana meliputi 2 (dua) distrik masing-masing: Distrik Pagimana serta Distrik Bunta dengan pusat kedudukan di Pagimana.

B. Kewedanan Banggai Laut yang berkedudukan di Banggai, terdiri atas :

Kecamatan Banggai meliputi 3 (tiga) distrik masing-masing: Distrik Banggai, Labobo Bangkurung dan Totikum, dengan pusat kedudukan di Banggai, Pulau Banggai. Kecamatan Kepulauan Peling atau Tinangkung meliputi 4 (empat) distrik masing-masing: Distrik Tinangkung, Bulagi, Buko dan Liang, dengan pusat kedudukan di Salakan, Pulau Peling. Adapun penyelenggaraan roda pemerintahan Daerah Tingkat II Banggai secara riil baru dimulai setelah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai yang pertama dikukuhkan pada tanggal 8 Juli 1960, sehingga tanggal 8 Juli inilah setiap tahun diperingati sebagai hari lahirnya Kabupaten Banggai.

Kabupaten Banggai merupakan wilayah yang memiliki persentase luas wilayah ke tiga terbesar di Sulawesi Utara yakni 11,63 % (1615,86 km²) setelah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Utara (Gambar 1). Berdasarkan hasil SP 2020 bahwa penduduk laki-laki di Sulawesi Utara sebanyak 1,34 juta orang, atau sebesar 51,18 % dari penduduk Sulawesi Utara. Sementara itu, jumlah penduduk perempuan di Sulawesi Utara sebanyak 1,28 juta orang atau sebesar 48,82 % dari penduduk Sulawesi Utara. Dari kedua informasi tersebut, dapat dilihat bahwa rasio jenis kelamin penduduk Sulawesi Utara adalah sebesar 105, yang artinya terdapat 105 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Sulawesi Utara pada tahun 2020.

Kabupaten Banggai merupakan salah satu daerah otonom dan masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah beribukota di Luwuk, terletak pada titik koordinat antara 122023' dan 124020' Bujur Timur, serta 0030' dan 2020' Lintang Selatan, memiliki Luas wilayah daratan ± 9.672,70 Km² atau sekitar 14,22 % dari luas Provinsi Sulawesi Tengah dan luas laut ± 20.309,68 Km² dengan garis pantai sepanjang 613,25 km. Wilayah Kabupaten Banggai berbatasan dengan :

- Bagian Utara berbatasan dengan Teluk Tomini

- Bagian Timur berbatasan dengan Laut Maluku dan Kab. Banggai Kepulauan
- Bagian Selatan berbatasan Selat Peling dan Kab. Banggai Kepulauan
- Bagian Barat berbatasan dengan Kab. Tojo Una-Una dan Kab. Morowali Utara

Secara administratif wilayah Kabupaten Banggai terbagi atas 23 kecamatan, 291 desa serta 46 kelurahan.

Tabel 2.1 Jumlah Persentase Penduduk Miskin P1, P2 Kab. Banggai 2020 - 2022

Variabel	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin (000)	28,16	30.10	28,55
Persentase Penduduk Miskin	7,39	7.83	7,33
P ₁	1,05	1.09	1,2
P ₂	0,21	0.23	0,28
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	417 863	431 639	457 335

Sumber : Data susenas 2020-2022

Berdasarkan data BPS pada Tabel 2.1 tentang indikator kemiskinan di Kabupaten Banggai menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin pada Tahun 2020 – 2022. Data ini mengindikasikan bahwa daerah Kabupaten Banggai masih perlu kerja keras untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dengan mengetahui ketimpangan –ketimpangan yang memicu sulitnya menekan jumlah penduduk yang miskin.

BAB III HASIL PENELITIAN SDGs TAHAP 1

Hasil penelitian SDGs tahap pertama adalah kondisi umum capaian kinerja pemerintah kabupaten Banggai, berikut capaian kinerja pemerintah Kabupaten Banggai berdasarkan 4 pilar SDGs.

3.1 Pilar Sosial

3.1.1 Goals 1 (Menghapus Kemiskinan)

1) Indikator 1.21* (Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan)

Berdasarkan informasi dari metadata SDGs edisi II (Kementarian PPN. 2020), dapat disimpulkan bahwa target 1.2 yang ditetapkan untuk tahun 2030 adalah mengurangi setidaknya setengah proporsi individu laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari berbagai kelompok umur yang tinggal dalam kondisi kemiskinan di semua aspek, sesuai dengan definisi nasional yang berlaku. Indikator 1.2.1* dalam rangka mencapai Goal 1 SDGs menetapkan tujuan untuk memastikan penurunan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, dengan mempertimbangkan jenis kelamin dan kelompok usia. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun kebutuhan lainnya (yang diukur melalui tingkat pengeluaran). Dengan memadukan status kemiskinan dengan status pekerjaan, konsep pekerja miskin dapat dijelaskan, dengan tujuan mengukur jumlah individu yang bekerja dan tidak bekerja yang hidup dalam kondisi kemiskinan.

Berdasarkan data yang dirilis oleh (BPS, 2017), perkembangan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah selama periode 2013-2017 terus meningkat secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan dalam persentase. Sebagai contoh, pada bulan Maret 2016, jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 420,52 ribu jiwa (14,45%), sementara pada bulan September 2016, jumlahnya turun menjadi 413,15 ribu jiwa (14,09%). Pada bulan Maret 2017, terjadi peningkatan sebanyak 4,72 ribu jiwa, mencapai 417,87 ribu jiwa (14,4%). Peningkatan ini diduga dipengaruhi oleh laju inflasi yang tinggi, yang menyebabkan kenaikan harga komoditi pangan seperti beras, cabe, rawit, gula pasir, cakalang, dan rokok kretek filter pada Maret 2017 dibandingkan dengan September 2016. Komoditi-komoditi ini sangat vital dalam konsumsi dasar pangan, sehingga berpengaruh terhadap garis kemiskinan pada Maret 2017.

Secara umum, pada periode Maret 2014 sampai dengan Maret 2023 tingkat kemiskinan di Kabupaten Banggai mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Akan tetapi, pada tahun 2015 tingkat kemiskinan mengalami kenaikan.

Tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan hingga tahun 2020. Pada Maret 2021, akibat adanya pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan kembali meningkat. Selanjutnya, pada tahun 2022 dan tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Banggai kembali mengalami penurunan.

Proyeksi hingga tahun 2030 menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah masih jauh dari target, dengan tingkat kemiskinan sekitar 9,34%. Artinya, proyeksi capaian masih berada dalam kategori D atau di bawah 75%.

2) Indikator 1.2.2* (Persentase Kesehatan Imunisasi Dasar)

Dalam metadata edisi 11, indikator 1.2.2 menunjukkan presentase individu laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari berbagai kelompok usia yang mengalami kehidupan dalam kondisi kemiskinan, sesuai dengan definisi nasional. Evaluasi kemiskinan dilakukan melalui analisis tiga dimensi, mencakup kekurangan atau ketidakmampuan dalam mengakses berbagai kebutuhan dasar kehidupan. Dimensi-dimensi tersebut terutama mencakup kesehatan (dengan tiga indikator), pendidikan (dengan dua indikator), dan standar hidup (dengan delapan indikator).

2.a Dimensi Kesehatan

a) Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)

Berdasarkan informasi dalam metadata SDGs edisi II, tinjauan terhadap aspek kesehatan mencakup imunisasi dasar, status gizi, dan indikator morbiditas, yang mencerminkan persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan. Hidayat (2008) menyatakan bahwa imunisasi merupakan langkah untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh bayi dan anak, bertujuan agar tubuh memiliki zat anti yang meningkatkan kekebalan dan mampu mencegah masuknya penyakit tertentu. Guna meningkatkan kesehatan anak agar menjadi generasi yang kuat dan sehat, pemerintah mewajibkan setiap anak menerima imunisasi dasar lengkap (IDL) guna mengurangi tingkat kematian akibat penyakit tertentu. Mulai tahun 2017 hingga 2020, Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah berhasil mencapai sasaran pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dengan pencapaian mencapai lebih dari 90%, walaupun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2020.

b) Gizi Masyarakat

Informasi mengenai status gizi balita usia 0-59 bulan berdasarkan indeks gizi kurang (BB/U), balita pendek (TB/U), dan balita kurus (BB/TB) di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020. Dari empat kabupaten yang menjadi fokus penelitian di kawasan Teluk Tomini, Kabupaten Tojo Una-Una menonjol sebagai

kabupaten dengan persentase tertinggi pada semua indeks status gizi balita jika dibandingkan dengan Kabupaten Banggai, Poso, dan Parigi Moutong. Situasi ini masih berlangsung pada tahun 2021.

c) **Morbilitas**

Morbilitas atau tingkat kesakitan merujuk pada proporsi penduduk yang mengalami masalah kesehatan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti terganggunya pekerjaan, sekolah, atau aktivitas normal lainnya. Kesulitan tersebut dapat melibatkan hambatan dalam melakukan kegiatan seperti bekerja, bersekolah, atau menjalani aktivitas harian dengan cara yang biasanya dilakukan.

Prevalensi penyakit menular di Provinsi Sulawesi Tengah, terutama di empat kabupaten yang menjadi fokus penelitian, telah menjadi permasalahan signifikan. Penyakit-penyakit seperti TBC, HIV/AIDS, kusta, ISPA, diare, dan berbagai penyakit lainnya telah menyumbang pada tingkat kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut.

- **Penyakit TBC**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dilihat bahwa angka penemuan kasus tuberkulosis (TBC) dan kesembuhan pada Tahun 2021 masih belum mencapai target, terutama di empat kabupaten yang menjadi fokus penelitian (Banggai, Tojo Una-Una, Poso, dan Parigi Moutong). Meskipun demikian, terdapat penurunan yang cukup signifikan dalam jumlah kasus dari Tahun 2019 hingga 2020. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah juga menjelaskan bahwa penurunan kasus TBC ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, yang secara signifikan memengaruhi upaya penanggulangan penyakit TBC di semua tingkatan, termasuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan fasilitas kesehatan.

- **Penyakit Kusta**

Menurut informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020, penyakit kusta merupakan bagian dari kategori penyakit tropis yang sering diabaikan. Jika tidak dideteksi dan diobati dengan cepat, penyakit ini dapat menyebabkan kecacatan. Dampak kecacatan tersebut dapat berdampak merugikan bagi penderita, keluarganya, bahkan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Sejak tahun 2018, kusta telah dianggap sebagai salah satu penyakit prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018. Penetapan ini juga diteruskan dalam Rencana Kerja Pemerintah yang diatur oleh

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2018 mengenai Rencana Kerja Pemerintah 2019.

Sejak tahun 2018, Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan signifikan dalam prevalensi kusta, bahkan berhasil mencapai target indikator nasional yang ditetapkan di bawah 1/10.000 penduduk, yakni sekitar 0,97/10.000 penduduk. Keadaan ini terus berlanjut hingga tahun 2020, di mana tingkat prevalensi kusta atau angka kesakitan kusta terus menurun mencapai 0,61/10.000 penduduk. Meskipun

- **Penyakit HIV/AIDS**

Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan jumlah kasus HIV positif. Pada tahun 2020, dilaporkan adanya 367 kasus HIV. Estimasi jumlah orang dengan risiko terinfeksi pada tahun tersebut mencapai 74.094 orang, dengan 63,89% dari mereka (sebanyak 47.340 orang) telah menerima pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar. Selain itu, terdapat perbedaan signifikan antara jumlah kasus HIV pada laki-laki dan perempuan, dengan lebih banyak kasus pada laki-laki. Kasus HIV juga dapat terjadi pada rentang usia yang luas, mulai dari dini hingga tua.

Analisis data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Banggai mencatat jumlah kasus HIV tertinggi sebanyak 51 kasus, sementara Kabupaten Tojo Una-Una memiliki jumlah kasus terendah hanya sebanyak 13 kasus. Adanya kecenderungan banyaknya kasus AIDS pada kelompok usia produktif, yaitu 20-29 tahun, mencapai 56,5%, sedangkan proporsi terendah terdapat pada kelompok usia 15-19 tahun sebesar 1,5%.

2.b Dimensi Pendidikan

Dimensi pendidikan menjadi salah satu penunjuk utama dalam mengukur tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menggambarkan bagaimana populasi dapat meraih dampak pembangunan melalui perolehan pendapatan, status kesehatan, aspek pendidikan, dan lainnya.

Diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan secara rutin dipublikasikan melalui laporan tahunan Human Development Report (HDR), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbentuk oleh tiga dimensi pokok, yakni 1) Usia panjang dan kehidupan sehat, 2) Pengetahuan, dan 3) Standar hidup yang layak. Dimensi pendidikan, yang mencerminkan perubahan dalam perilaku

masyarakat sejalan dengan peningkatan tingkat pendidikan, mencakup dua indikator utama pada IPM, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perilaku masyarakat terus mengalami perubahan sebagai hasil dari peningkatan pendidikan yang terus-menerus.

- **Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Indeks Human Development (HLS) di Provinsi Sulawesi Tengah terus menunjukkan peningkatan sepanjang periode dari tahun 2017 hingga 2020, sebagaimana yang tercatat dalam Tabel 3.9. Informasi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2020 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pembangunan manusia di wilayah tersebut terus berkembang. Peningkatan ini dapat dilihat dari angka presentase HLS Provinsi Sulawesi Tengah, yang meningkat dari 13,04% pada tahun 2017 menjadi 13,17% pada tahun 2020. Meskipun demikian, proyeksi pencapaian menunjukkan bahwa pada tahun 2030, persentase HLS di Provinsi Sulawesi Tengah dapat mencapai target kategori A. Tetapi, diperlukan upaya peningkatan strategi oleh pemerintah Kabupaten Banggai, Tojo Una-Una, dan Poso agar HLS di ketiga kabupaten ini mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2030.

- **Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)**

Pertumbuhan Capaian RLS di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020 mencapai 1,45%, menjadi faktor krusial dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut. Analisis pada Tabel 2.10 menunjukkan bahwa proyeksi Capaian RLS di Provinsi Sulawesi Tengah masih mencapai 86,07%, dikategorikan sebagai Kategori C. Hal ini menandakan perlunya penyelidikan lebih mendalam terhadap upaya untuk meningkatkan RLS guna mencapai target yang diinginkan. Di tingkat kabupaten, Kabupaten Parigi Moutong ternyata masih jauh dari pencapaian target pada tahun 2030, karena proyeksi Capaian RLS hanya mencapai 45,75%, dikategorikan sebagai Kategori E. Sebaliknya, Kabupaten Banggai, Tojo Una-Una, dan Kabupaten Poso memiliki proyeksi Capaian RLS yang tidak terlalu berbeda jauh dengan Kabupaten Parigi Moutong, masih berada di bawah 75%, yaitu dikategorikan sebagai Kategori D. Artinya, dalam dimensi pendidikan, terutama untuk RLS, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan empat kabupaten di kawasan Teluk Tomini perlu mengimplementasikan upaya dan strategi yang lebih terfokus untuk meningkatkan

Capaian RLS. Hal ini bertujuan agar semua anak usia sekolah di berbagai tingkatan pendidikan dapat mengakses pendidikan formal dengan baik.

2.c Dimensi Standar Hidup

Untuk menilai tingkat kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, yang merujuk pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh Worldbank. Pendekatan ini melihat kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pangan, bukan sekadar mengukurnya dari aspek pengeluaran. Dimensi standar hidup menjadi gambaran kondisi sehari-hari individu dalam perspektif ini.

- **Tanpa Akses Air Bersih**

Salah satu sasaran dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di sektor lingkungan hidup adalah memastikan bahwa semua masyarakat memperoleh akses universal terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai. Tujuan tersebut bertujuan untuk mencapai akses universal dalam penyediaan air minum dan sanitasi pada tahun 2030. Air minum yang dapat dianggap aman untuk kesehatan adalah air yang memenuhi standar fisik, mikrobiologis, kimia, dan radioaktif. Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air bersih mencakup mereka yang tidak dapat mengakses air minum dari sumber seperti air ledeng/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang dilindungi, dan air hujan (termasuk air kemasan). Hal ini diukur dengan mempertimbangkan jarak minimal 10 meter ke fasilitas jamban atau bahwa akses terhadap air bersih tidak lebih dari 30 menit berjalan kaki dari tempat tinggal.

Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021, sekitar 93,01% penduduk telah memperoleh akses air bersih baik pada tahun 2020 maupun 2021. Artinya, hanya sekitar 6,9% penduduk yang tidak dapat mengakses air bersih. Situasi ini menuntut perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, terutama di Kabupaten Poso, di mana hanya 5% memiliki sarana air minum yang terinspeksi kesehatan lingkungan, dan hanya 30% yang memiliki sarana air minum yang memenuhi syarat menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021. Kondisi ini juga menunjukkan tingkat akses air bersih yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Banggai, Tojo Una-Una, dan Parigi Moutong.

- **Tanpa Sanitasi Layak**

Evaluasi komponen sanitasi dapat diukur melalui persentase rumah tangga yang tidak memiliki toilet yang memenuhi standar. Salah satu langkah untuk mencegah penyakit adalah dengan meningkatkan sanitasi, terutama dalam penggunaan toilet yang sesuai dengan norma kesehatan. Penggunaan toilet yang tidak memenuhi standar kesehatan dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat secara umum. Selain itu, penggunaan toilet yang memenuhi standar juga menjadi indikator perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta merupakan syarat penting dari fasilitas rumah yang sehat. Toilet yang memenuhi standar sanitasi, seperti dilengkapi dengan leher angsa, tanki septik/sarana pengolahan air limbah (SPAL), dan digunakan secara individual atau bersama-sama, dianggap sebagai fasilitas sanitasi yang sesuai dengan standar kesehatan (Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2021).

Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 menetapkan sasaran mencapai 65% akses kepala keluarga terhadap fasilitas sanitasi yang memadai, seperti Jamban Sehat. Namun, hasilnya melampaui harapan dengan pencapaian sebesar 73,1%, melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun tersebut, jumlah kepala keluarga mencapai 1.675.594, dan ternyata sekitar 1.224.853 KK telah memperoleh akses ke fasilitas sanitasi yang memadai, setara dengan 73,1%. Cakupan akses kepala keluarga terhadap fasilitas sanitasi yang memadai, yang disebut Jamban Sehat, mencapai tingkat terendah di Kabupaten Tojo Una-Una. Pada tahun 2020, persentasinya sekitar 68,9%, meningkat sedikit menjadi 71,9% pada tahun 2021. Oleh karena itu, diperlukan upaya besar dari pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk secara signifikan meningkatkan akses sanitasi yang memadai. Selain itu, perlu dilakukan program penyadaran perilaku terkait penggunaan sanitasi yang memadai di kalangan masyarakat.

3.1.2 Goals 3 (Kesehatan Yang Baik dan Kesejahteraan)

Dari 39 tolok ukur TPB/SDGs di Pilar Pembangunan Sosial Goals 3 Kabupaten Banggai, tidak terdapat indikator yang dapat dikenali karena data yang diperlukan untuk proyeksi yang lebih tepat terhadap pencapaian indikator tersebut belum tersedia dari BPS.

3.1.3 Goals 4 (Pendidikan Berkualitas)

1) Indikator 4.1.2*

Sasaran yang tercantum pada poin 4.1. adalah mencapai pada Tahun 2030, memastikan bahwa segala anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa biaya, setara, dan bermutu tinggi, yang menghasilkan pencapaian pembelajaran yang sesuai dan efektif. Di sisi lain, indikator 4.1.2* ini mengevaluasi proporsi anak-anak dan remaja: (a) di kelas 4, (b) pada tahap akhir SD/kelas 6, (c) pada tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. Indikator ini menilai pencapaian siswa dalam kompetensi dasar akademik, termasuk literasi membaca dan numerasi matematika. Capaian ini mencerminkan mutu pendidikan dasar (SD dan SMP) di Indonesia. Sumber data ini berasal dari data nasional dan provinsi, tetapi tidak diuraikan dalam analisis.

2) Indikator 4.2.1

Indikator ini mengevaluasi tingkat pencapaian dalam menyelesaikan pendidikan tingkat dasar atau setingkatnya, menengah pertama atau setingkatnya, dan menengah atas atau setingkatnya. Dengan menggunakan indikator ini, dapat diukur persentase anak-anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan tahapan pendidikan sesuai dengan rentang usia mereka, terutama pada usia wajib belajar yang dimulai sejak 7 tahun. Dalam asumsi bahwa siswa belajar secara penuh waktu dan tidak mengalami penundaan kelas, mereka diharapkan lulus dari pendidikan dasar atau setingkatnya pada usia sekitar 12 tahun. Oleh karena itu, rentang usia yang digunakan untuk menghitung tingkat kelulusan pendidikan dasar atau setingkatnya adalah antara 13 tahun ($12 + 1$ tahun) hingga 15 tahun ($12 + 3$ tahun).

Berdasarkan data BPS nasional, terlihat bahwa tingkat penyelesaian pendidikan di SD dari Tahun 2020 hingga 2023 terus meningkat, sebagaimana tercermin pada Gambar 6.22. Hasil tersebut menunjukkan bahwa persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan di SD terus meningkat di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah, bahkan hampir mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga provinsi tersebut telah berhasil mencapai target 97% dari target SDGs nasional (98%) untuk persentase siswa menyelesaikan pendidikan di tingkat SD.

Sementara tingkat pencapaian pendidikan di SMP di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan kecenderungan peningkatan, tercatat mencapai lebih dari 90% pada tahun 2020. Sementara itu, Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah masih berada dalam rentang 80-88%. Namun, pada jenjang SMA dan setara, terdapat penurunan signifikan di Provinsi Sulawesi Tengah, yakni sekitar 53,73% pada tahun 2022.

3.1.4 Goals 5 (Kesetaraan Gender)

Dari 14 kriteria TPB/SDGs Pilar Pembangunan Sosial Goals 5 di Kabupaten Banggai, tercatat tidak terdapat indikator yang dapat diidentifikasi karena data yang diperlukan untuk proyeksi yang lebih akurat terhadap pencapaian kriteria-kriteria tersebut belum tersedia dari BPS.

3.2 Pilar Ekonomi

Di antara tiga wilayah di kawasan Teluk Tomini, penggunaan gas rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tengah masih termasuk rendah, dengan capaian sebesar 68,96%. Capaian rasio penggunaan gas rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tengah masih tergolong rendah di antara tiga wilayah di kawasan teluk tomini dengan capaian sebesar 68,96% namun diprediksi akan mencapai 100%. Persentase penduduk yang bekerja di sektor informal (non-pertanian) menunjukkan tren fluktuatif. Di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah, capaian pada indikator ini mengalami penurunan dari 2017 hingga 2019, tetapi mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 di ketiga wilayah tersebut. Perubahan ini kemungkinan disebabkan oleh adanya lapangan pekerjaan tambahan di sektor informal selama masa pandemi, didorong oleh kemajuan teknologi yang menciptakan peluang kerja di sektor perdagangan daring.

Pada Goals 7 yakni energi terjangkau dan bersih. Hasil pencarian data mengungkap bahwa dari keseluruhan 16 indikator yang diselidiki, hanya 5 indikator yang dapat diidentifikasi dan diperkirakan. Pada indikator 7.1.1* mengenai rasio elektrifikasi, data hanya tersedia untuk empat Kabupaten/Kota dan tiga Provinsi. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Tengah diperkirakan dapat mencapai target global dan target PERPRESS Nomor 111 Tahun 2020 dengan mencapai 100%.

Pada Goals 8 yakni Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Beberapa catatan penting dapat diidentifikasi pada tahun 2020, di mana terjadi perlambatan pertumbuhan

ekonomi hampir di semua sektor. Jika dibandingkan secara regional, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Gorontalo sebelum wabah pandemi Covid-19 merupakan yang paling rendah di antara tiga provinsi di Kawasan Teluk Tomini. Pada tahun 2019, Sulawesi Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 15 persen, diikuti oleh Sulawesi Utara sebesar 7.90 persen, dan Gorontalo sebesar 7.49 persen. Namun, situasinya berubah pada tahun 2020, di mana pertumbuhan PDRB per kapita di ketiga wilayah ini mengalami koreksi negatif karena penyebaran virus Covid-19 yang merata di semua sektor perekonomian. Berdasarkan data BPS, Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan PDRB per kapita paling lambat, yakni 2.06 persen pada tahun 2020 dan 2.02 persen pada tahun 2021. Sementara itu, dua provinsi lainnya menunjukkan tren pemulihan ekonomi mulai terlihat pada tahun 2021, dengan pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 4.37 persen untuk Gorontalo dan 23.3 persen untuk Sulawesi Tengah.

Pada Goals 9 yakni membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, dengan target untuk mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan proporsi industri dalam PDRB. Di Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai mencatat perlambatan terendah dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) industri manufaktur, dengan laju pertumbuhan sebesar -10,77%, kemudian pada tahun 2023 naik menjadi 0.72%

Pada Goals 9 yakni Tujuan 10 adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan target untuk mempertahankan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Pada Goals 10 yakni mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan target untuk mempertahankan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Analisis tingkat kesetaraan pendapatan penduduk dilakukan dengan mempergunakan metode pengeluaran konsumsi per kapita rumah tangga. Berdasarkan data BPS, rasio gini Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah selama lima tahun terakhir menunjukkan tingkat kesetaraan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan rasio gini nasional. Tahun 2023 rasio gini kabupaten Banggai mencapai 28.3%. Tidak semua indikator dalam tujuan tersebut menjadi fokus utama pembangunan di Kawasan Teluk Tomini. Sebagai contoh, terkait dengan upaya mengurangi kemiskinan, ketersediaan data dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk merancang program kerja yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Pada Goals 17 yakni kemitraan untuk mencapai Tujuan. Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama global untuk mencapai sisa 16 tujuan SDGs. Tujuan 17 bertujuan untuk membangun kemitraan yang kuat dan berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Berdasarkan hasil penelusuran data, ditemukan bahwa proporsi penerimaan pajak daerah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di seluruh wilayah Teluk Tomini tergolong rendah. Rasio ini menunjukkan kecenderungan peningkatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, di Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, rasio pajak terhadap PDB cenderung stabil, sedangkan di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Bolssel dan Boltim, rasio tersebut menunjukkan kecenderungan penurunan (Arham et al., 2023).

3.2.1 Goals 7 (Energi Bersih dan Terjangkau)

Pada target ketujuh, terdapat dua tanda yang dapat diidentifikasi, yakni 7.1.1 yang berkaitan dengan proporsi elektrifikasi, dan 7.2.1(b) yang menyangkut proporsi penggunaan gas untuk keperluan rumah tangga.

1) Indikator 7.1.1* (Rasio Elektrifikasi)

Dari total 11 kabupaten/kota dan 3 provinsi yang memiliki data relevan, hanya Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Parigi Moutong, serta Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah yang mengungkapkan informasi tersebut. Dalam rentang waktu 2017-2021, tercatat peningkatan rasio elektrifikasi di tiap-tiap provinsi. Pada tahun 2021, Sulawesi Tengah mencatatkan rasio elektrifikasi tertinggi, yakni 97,96%.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2020, diharapkan pada tahun 2024 rasio elektrifikasi mencapai 99,20%. Informasi tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di setiap Provinsi, baik yang menggunakan listrik PLN maupun listrik non-PLN, telah mendapat akses listrik, mendekati 100%. Ini menandakan tersebarnya ketersediaan listrik di hampir semua wilayah Provinsi, mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah Teluk Tomini. Proyeksi tahun 2030 menunjukkan ketiga Provinsi diprediksi mencapai tingkat ketercapaian 100% atau masuk dalam kategori A. Dengan merujuk pada target tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa setiap wilayah memiliki peluang besar untuk mencapai sasaran tersebut.

2) Indikator 7.2.1(b) (Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga)

Informasi tentang rasio penggunaan gas rumah tangga sesuai dengan parameter 7.2.1(b) hanya tersedia pada tingkat Provinsi. Meskipun terjadi peningkatan yang signifikan dalam elektrifikasi, penggunaan gas rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2017-2021 masih relatif rendah jika dibandingkan dengan dua wilayah di sekitar Teluk Tomini, hanya mencapai 68,96%.

3.2.2 Goals 8 (Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Misi 8 bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menyediakan peluang kerja yang produktif dan merata, serta menghasilkan lapangan kerja yang layak bagi semua individu.

1) Indikator 8.1.1* (Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita)

Peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di tiga wilayah sekitar Teluk Tomini, termasuk Provinsi Sulawesi Tengah, menunjukkan kemajuan yang positif dalam tiga tahun terakhir, terutama dari tahun 2017 hingga 2019.

2) Indikator 8.1.1(a) (PDRB Per Kapita)

PDRB per kapita mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap individu dalam satu tahun. Kinerja ini sejalan dengan perbandingan antara pertumbuhan PDRB dan jumlah penduduk. Meskipun laju pertumbuhan PDRB per kapita melambat, namun ada peningkatan dalam lima tahun terakhir di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Walau begitu, ekonomi di seluruh wilayah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2021, yang terlihat dari kenaikan PDRB per kapita sebesar 23.3% di Provinsi Sulawesi Tengah.

3) Indikator 8.2.1* (Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun)

Indeks ini menunjukkan seberapa efisien tenaga kerja dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Selama rentang waktu 2017-2021, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per pekerja di Sulawesi Tengah mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2017, tercatat pertumbuhan tertinggi mencapai 13.60% di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, pencapaian tersebut mengalami penurunan yang mencolok, turun drastis menjadi 1.38% di wilayah

Sulawesi Tengah pada tahun 2020. Seiring dengan pemulihan ekonomi, tingkat pertumbuhan PDRB sebenarnya per orang bekerja per tahun kembali meningkat, dengan Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup mencolok dari 1.38% pada tahun 2020 menjadi 11.09% pada tahun 2021.

4) Indikator 8.3.1* (Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin)

Banyak dari populasi yang terlibat dalam sektor informal (bukan pertanian) mengalami fluktuasi dalam pencapaian mereka. Dalam periode 2017-2019, ada penurunan dalam pencapaian indikator ini di Sulawesi Tengah, tetapi pada tahun 2020, terjadi peningkatan yang signifikan. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya lapangan pekerjaan baru di sektor informal selama pandemi, yang terpicu oleh kemajuan teknologi. Ini juga membuka peluang baru dalam perdagangan daring.

5) Indikator 8.5.1* (Upah rata-rata per jam pekerja)

Indikator ini secara umum menggambarkan kesejahteraan pekerja di sektor buruh. Gaji rata-rata per jam pekerja di Provinsi Sulawesi Tengah hanya mengalami penurunan sekali pada tahun 2018 sebesar sekitar Rp 308.00, meskipun tidak signifikan.

6) Indikator 8.5.2* (Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah suatu parameter yang dipakai untuk mengukur tingkat tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan atau belum terserap oleh pasar kerja. Indikator ini dapat memberikan petunjuk mengenai performa pasar kerja serta mencerminkan kondisi ekonomi khusus, seperti resesi, perubahan dalam siklus bisnis dan teknologi, dan sebagainya. Selama periode 2017 hingga 2022, terlihat bahwa TPT di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan yang signifikan, melorot dari 3.81% menjadi 3.00%.

7) Indikator 8.5.2(a) (Persentase setengah pengangguran)

Jumlah pengangguran setengah di Sulawesi Tengah meningkat secara signifikan dari 9.10% pada tahun 2020 menjadi 10.53% pada tahun 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh efek pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan jam kerja dan pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri. Akibatnya, banyak pekerja terpaksa bekerja di bawah standar jam

kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam per minggu, sementara sejumlah lainnya aktif mencari atau siap menerima pekerjaan. Kenaikan yang signifikan dalam jumlah pengangguran setengah mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dalam angka tenaga kerja yang tidak dapat digunakan sepenuhnya.

8) Indikator 8.6.1* (Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET))

Jumlah pemuda (usia 15-24 tahun) yang tidak terlibat dalam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan (NEET) di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan dari 21,04% pada tahun 2017 menjadi 22,31% pada tahun 2021. Kenaikan ini menandakan kebutuhan akan kebijakan yang mendukung pengembangan keterampilan bagi generasi muda serta menyediakan fasilitas yang mempermudah transisi mereka ke dunia kerja, termasuk perbaikan dalam kondisi ketenagakerjaan.

9) Indikator 8.7.1(a) (Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur)

Indikator ini menggambarkan kondisi anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan di luar kerangka hukum dan regulasi. Sulawesi Tengah mencatat prestasi yang mencolok dengan angka sekitar 5,12% dari anak-anak usia 10-17 tahun yang bekerja pada tahun 2021.

3.2.3 Goals 9 (Industri, Inovasi & Infrastruktur)

Sasaran 9 bertujuan untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan industri yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Fokusnya adalah pada pengembangan fasilitas fisik dasar yang penting bagi bisnis dan masyarakat. Di samping itu, industrialisasi bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Inovasi memegang peran penting dalam meningkatkan kemampuan teknologi dalam sektor industri dan mendorong perkembangan keterampilan baru. Dari 8 indikator Pilar Ekonomi Tujuan 9 TPB/SDGs yang berada dalam kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dapat disimpulkan bahwa 5 indikator telah tercapai berdasarkan data yang disediakan oleh BPS.

1) Indikator 9.1.1(a) (Kondisi mantap jalan nasional)

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, sekitar 90% atau lebih dari total jaringan jalan nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dinyatakan dalam kondisi baik dan sedang pada tahun 2021, sesuai laporan yang diberikan.

2) Indikator 9.1.2* (Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita)

Peningkatan pemulihan ekonomi nasional telah memberikan dampak positif terhadap kinerja industri manufaktur sepanjang tahun 2021. Kinerja sektor manufaktur menjadi sangat penting karena kontribusinya yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kawasan Teluk Tomini. Pada tahun 2021, Provinsi Sulawesi Tengah mencatat pencapaian sebesar 29.11%, menunjukkan kenaikan sebesar 1.93% dari tahun sebelumnya. Capaian Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun 2017 hingga 2021.

3) Indikator 9.2.1(a) (Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur)

Meskipun terjadi peningkatan dalam kontribusi sektor manufaktur terhadap PDRB, pertumbuhan ekonomi industri manufaktur di Kawasan Teluk Tomini tetap tidak stabil, sering mengalami fluktuasi dan penurunan. Mayoritas daerah di Sulawesi Tengah pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Tojo Una-Una, khususnya, mencatatkan angka pertumbuhan sebesar -0,28% pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2021, terjadi peningkatan pada indikator tersebut seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 untuk tahun 2024, diperkirakan mayoritas wilayah di Kawasan Teluk Tomini akan mencapai tingkat kategori C dan D. Kabupaten Tojo Una Una, dalam hal pertumbuhan PDB industri manufaktur, diprediksi akan mencapai tingkat pencapaian kurang dari 50% dari target tahun 2024. Sekitar 25% dari proyeksi pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Tujuan 9 pada tahun 2024 diperkirakan akan termasuk dalam kategori A, sedangkan 5% proyeksi pencapaian akan termasuk dalam kategori B, 15% dalam kategori C, 50% dalam kategori D, dan sekitar 5% proyeksi pencapaian akan termasuk dalam kategori E. Tingkat pencapaian yang diproyeksikan di bawah 75% (Kategori C, D, dan E) pada tahun 2024 menunjukkan perlunya pemerintah daerah melakukan intervensi lebih lanjut terhadap indikator tersebut. Langkah ini bertujuan untuk mendorong pencapaian target TPB/SDGs di tahun 2030 dan mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kawasan Teluk Tomini.

3.2.4 Goals 10 (Berkurangnya Kesenjangan)

Sasaran 10 bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dengan fokus pada menjaga pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 persen dari total populasi, mencapai tingkat di atas rata-rata nasional. Diperlukan kebijakan yang sesuai untuk mengatasi meningkatnya ketidaksetaraan, dengan penekanan pada memberdayakan penduduk berpenghasilan rendah. Dalam konteks 12 indikator Pilar Ekonomi Tujuan 10 dari TPB/SDGs yang menjadi tanggung jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdapat 7 indikator yang dapat diidentifikasi mencapai tujuannya berdasarkan data yang diperoleh dari BPS.

1) Indikator 10.1.1* (Rasio Gini)

Indikator ketidaksetaraan pengeluaran, dikenal sebagai Rasio Gini, digunakan untuk menilai seberapa merata distribusi pengeluaran. Tujuan utamanya adalah mendekati nol, menandakan upaya meratakan distribusi pendapatan di antara penduduk. Prestasi Rasio Gini Sulawesi Tengah mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada 2022, terjadi penurunan dari 0.326 di 2021 menjadi 0.308 di Maret 2022, menunjukkan variasi yang berlangsung. Dibandingkan dengan rasio Gini nasional, rasio Gini Sulawesi Tengah tetap lebih rendah.

2) Indikator 10.1.1(a) (Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur)

Prinsipnya, prestasi yang mencerminkan fokus pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Secara keseluruhan, terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2017 hingga 2019. Meskipun angka kemiskinan meningkat pada tahun 2020 karena dampak pandemi Covid-19, hal ini berhasil diperbaiki pada tahun 2021 dan 2022.

Menurut data BPS tahun 2020, tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah berada di bawah Gorontalo, dengan rata-rata kemiskinan sekitar 13.00% dalam rentang waktu 2017-2022. Namun, tingkat kemiskinan di wilayah tersebut tetap lebih tinggi dari rata-rata nasional pada periode yang sama.

3) Indikator 10.2.1* (Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas)

Indikator ini digunakan untuk mengukur kemiskinan relatif dan memonitor perubahan kesejahteraan proporsional di antara individu dengan pendapatan kurang dari setengah dari nilai median pendapatan total populasi. Dari 2018 hingga 2021, terdapat kecenderungan menurunnya jumlah individu yang tinggal di bawah 50% median pendapatan di kawasan Teluk Tomini. Semakin sedikit proporsi ini, semakin besar peningkatan kesejahteraan yang dialami oleh kelompok pendapatan rendah.

Indikator TPB		Level Agregasi	Satuan	Sumber Data	Kondisi Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Provinsi Sulawesi Utara	%	BPS	N/A	14.00	31.01	12.91	12.43
		Provinsi Gorontalo	%	BPS	N/A	27.71	25.51	24.28	20.84
		Provinsi Sulawesi Tengah	%	BPS	N/A	13.99	13.02	12.20	11.39

Sumber : (Arham et al., 2023)

Gambar 4.1 menunjukkan persentase penduduk yang tinggal di bawah pendapatan median dari tahun 2017 hingga 2021.

4) Indikator 10.3.1(a) (Indeks Kebebasan)

Indeks kebebasan adalah alat untuk mengukur kebebasan sipil, baik pada tingkat individu maupun kelompok, terkait dengan empat variabel utama kebebasan. Variabel ini mencakup kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Indeks ini juga mencerminkan tingkat kesetaraan akses individu atau kelompok dalam partisipasi pemerintahan. Tingkat kebebasan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: "baik" untuk nilai indeks di atas 80, "sedang" untuk nilai antara 60-80, dan "buruk" untuk nilai di bawah 60. Selama periode 2017-2021, terjadi fluktuasi dalam indeks kebebasan, tetapi tetap berada dalam kategori baik. Sulawesi Tengah merupakan provinsi dengan indeks kebebasan tertinggi, mencapai di atas 90.00 selama lima tahun terakhir.

3.2.5 Goals 17 (Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan)

SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat sepenuhnya tercapai dengan tekad dan kerjasama global yang sungguh-sungguh. Meskipun bantuan pembangunan dari negara-negara maju meningkat secara signifikan, yaitu sekitar 66% antara tahun 2000 dan 2014, krisis kemanusiaan yang diakibatkan oleh konflik dan bencana alam masih memerlukan bantuan dan sumber daya yang mendesak. Banyak negara juga meminta bantuan resmi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan pembangunan. SDGs, khususnya Goal 17, menekankan pentingnya memperkuat dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Di lingkungan universitas, pendekatan holistik diperlukan untuk melihat kontribusi mereka melalui kolaborasi internasional, promosi praktik-praktik terbaik, dan penyebaran data. Hanya dengan kerja sama komprehensif dari semua mitra menuju SDGs, tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud.

Data investigasi menunjukkan bahwa rasio penerimaan pajak daerah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di seluruh wilayah Teluk Tomini cenderung rendah. Di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, rasio pajak terhadap PDB cenderung stabil. Namun, proyeksi menunjukkan adanya kemungkinan kontraksi hingga tahun 2030, menandakan tingginya ketergantungan pada pendapatan transfer sebagai sumber utama pendapatan pemerintah. Ketergantungan ini menyebabkan wilayah Teluk Tomini diklasifikasikan sebagai kategori E dalam pencapaian indikator Rasio penerimaan pajak terhadap PDB untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

3.3 Pilar Lingkungan

3.3.1 Goals 6 (Air Bersih & Sanitasi Layak)

Salah satu dari tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6, bertujuan untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi bagi semua individu. Terdapat delapan target pencapaian dengan 21 indikator yang terkait dengan Goal 6. Dari keseluruhan indikator tersebut, tujuh di antaranya tidak memiliki data yang tersedia. Ada sembilan indikator yang telah dianalisis, sedangkan lima indikator lainnya belum melalui proses analisis. Indikator yang belum dianalisis melibatkan wilayah disekregasi nasional dan indikator global yang masih dalam tahap pengembangan.

Hasil analisis pada Goals 6 yakni bertujuan untuk memastikan akses universal dan berkelanjutan terhadap air bersih dan sanitasi yang aman, serta mengatasi masalah

terkait kebersihan air dan pengelolaan air secara efisien. Kabupaten Banggai termasuk salah satu kabupaten yang yang berhasil dalam pelaksanaan setiap sub-indikator pada Goals 6. Penggunaan air minum dan sanitasi tahun 2023 untuk penduduk miskin adalah air minum layak 86.96%, air minum bersih 52.17%, sanitasi layak 56.25%, sementara untuk pendudukan tidak miskin adalah Air Minum layak 90.41%, air minum bersih 80.35, sanitasi layak 57.23%.

3.3.2 Goals 11 (Kota & Pemukiman Yang Berkelanjutan)

Sasaran 11 dalam Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) bertujuan untuk mencapai kota dan permukiman yang berkelanjutan, dengan fokus utama pada pembuatan kota dan permukiman menjadi inklusif, aman, tahan bencana, dan tetap berkelanjutan. Upaya ini ditujukan untuk mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030. Sasaran 11 mencakup sepuluh target secara global dan 27 petunjuk di tingkat nasional. Dalam penelitian ini, evaluasi pencapaian dilakukan untuk lima sasaran dengan menganalisis lima petunjuk yang dapat diakses. Namun, petunjuk lainnya tidak dipertimbangkan karena keterbatasan data, bahkan beberapa di antaranya belum tersedia. Berikut adalah hasil pemetaan petunjuk TPB/SDGs di daerah Teluk Tomini berdasarkan ketersediaan data pada Tujuan 11.

Hasil analisis pada Goals 11 yakni bertujuan untuk membuat kota dan permukiman menjadi inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Pada goals 11 tidak ditemukan data oleh peneliti mengenai Goals 11 di Kabupaten Banggai. Walaupun demikian, berdasarkan perhitungan data dari kabupaten bahwa Sulawesi Tengah telah mencapai target nasional dalam hal indikator akses hunian layak.

3.3.3 Goals 12 (Konsumsi & Produksi Yang Bertanggungjawab)

Pilar ke-12 dalam tujuan pembangunan berkelanjutan terfokus pada lingkungan, bertujuan untuk menegakkan pola produksi dan konsumsi yang berkesinambungan. Terdapat 23 indikator yang digunakan untuk menilai pencapaian Goals 12.

Data di Pilar Lingkungan, terutama terkait dengan tujuan ke-12, masih sangat kurang. Hanya lima indikator yang tersedia, sementara enam indikator lainnya belum memiliki data. Selain itu, ada 12 indikator yang belum dievaluasi, termasuk indikator yang dibagi menjadi level nasional dan global yang masih dalam proses pengembangan.

Hasil analisis pada Goals 12 yakni menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Proyeksi hasil pencapaian indikator 12.1.1* perencanaan dan

pelaksanaan strategi untuk mewujudkan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan menunjukkan bahwa terdapat dua kategori berdasarkan jenis bahan yang dikonsumsi dan diproduksi, yakni makanan dan non-makanan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), data hanya tersedia untuk dua Provinsi, yaitu Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa implementasi strategi untuk mencapai tujuan pola konsumsi dan produksi dari tahun 2018 hingga 2030 menunjukkan peningkatan pada konsumsi makanan. Sementara itu, pada kategori non-makanan, terjadi penurunan di Provinsi Gorontalo dan peningkatan di Provinsi Sulawesi Tengah. Proyeksi hasil pencapaian Indikator 12.3.1.(a), yaitu persentase sisa makanan yang diperoleh dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSaN) PSLB3 KLHK, dapat ditemukan di <http://sipsn.menlhk.go.id/>. Data tersebut tersedia untuk satu kota dan lima kabupaten kota. Hasil proyeksi pencapaian indikator menunjukkan bahwa dua kategori wilayah mengalami peningkatan, sementara empat wilayah mengalami penurunan. Persentase sisa makanan merupakan bagian integral dari pengelolaan sampah, dan hal ini dapat memengaruhi sistem pengelolaan sampah secara nasional.

Sementara itu, proyeksi hasil pencapaian Indikator 12.4.2* menunjukkan bahwa limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan per kapita, berdasarkan data yang tersedia dari seluruh wilayah, termasuk dalam kategori meningkat. Untuk sub-indikator (b), proporsi limbah B3 yang ditangani dan diolah di enam wilayah, berdasarkan proyeksi pencapaian, mengalami penurunan pada sektor Pertambangan, Energi, dan Manufaktur, sementara sektor Prasarana dan Jasa mengalami

Hasil analisis pada Goals 13 yakni Penanganan Perubahan Iklim. Tujuan utamanya adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dalam rangka mencapai tujuan nasional penanganan perubahan iklim pada Tahun 2030. Indikator 13.1.1* di Sulawesi Tengah telah mencapai target nasional, dengan jumlah korban meninggal akibat bencana yang berada di bawah 0,2 per 100.000 jiwa setiap tahun. Kabupaten Banggai masuk dalam kategori A untuk indikator jumlah korban meninggal, hilang, dan yang terkena dampak bencana per 100.000 orang.

Hasil analisis pada Goals 14 yakni Ekosistem Lautan. Tujuan khusus dari Goal 14 ini adalah mempertahankan dan menggunakan secara berkelanjutan laut, laut, dan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan. Pencapaian indikator 14.b.1(b) di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan tren penurunan, sehingga belum memenuhi

sasaran nasional untuk meningkatkan akses pendanaan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil.

Hasil analisis pada Goals 15 yakni melindungi, memulihkan, dan mempromosikan pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Kondisi ketercapaian Goals 15 pada Sulawesi Tengah adalah proporsi luas kawasan hutan terhadap total luas lahan di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan, dari 63,4% menjadi 63,62%. Proporsi ini cenderung stabil hingga tahun 2020 (Lihawa et al., 2023).

3.3.4 Goals 13 (Penanganan Perubahan Iklim)

Salah satu dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) adalah mengatasi dampak perubahan iklim, yang dijabarkan dalam Goal 13. Fokus utamanya adalah mengambil tindakan segera untuk menangani konsekuensi perubahan iklim agar dapat mencapai target penanganan perubahan iklim pada tingkat nasional pada tahun 2030. Dampak dari perubahan iklim telah terasa secara global di berbagai wilayah dunia, yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK). Hal ini mengakibatkan pemanasan global yang mempengaruhi sistem iklim dalam jangka waktu yang panjang. Karena Indonesia memiliki kondisi sebagai negara kepulauan, hal ini menjadikannya lebih rentan terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi sangat penting dan perlu dilaksanakan melalui kebijakan nasional serta strategi di tingkat nasional maupun lokal.

Data untuk mencapai tujuan ke-13 di Kawasan Teluk Tomini belum sepenuhnya dapat diakses. Dari total 8 indikator yang ada, hanya 2 indikator yang dapat diidentifikasi memiliki data yang tersedia. Namun, beberapa indikator hanya memiliki data untuk tingkat provinsi. Keberhasilan mencapai Goals 13, terutama pada indikator 13.1.1, sudah sesuai dengan target nasional. Angka kematian akibat bencana saat ini berada di bawah 0,2 per 100.000 penduduk setiap tahun.

Berdasarkan identifikasi data indikator tujuan ke-13, terdapat dua indikator yang memiliki data tersedia, yaitu jumlah korban bencana dan emisi gas rumah kaca (GRK) setiap tahun. Pada tahun 2021, di tiga Provinsi di kawasan Teluk Tomini, jumlah korban bencana, termasuk kematian, hilang, atau terkena dampak lain, mencapai kurang dari 0,2 jiwa per 100.000 orang. Ini menunjukkan pencapaian target SDGs sesuai PERPRES No. 11 tahun 2020. Perbandingan antara tahun 2017 dan 2021 menunjukkan penurunan

jumlah korban bencana. Perlu dicatat bahwa tidak ada proyeksi untuk indikator ini karena data bencana bervariasi sesuai kejadian di wilayah tertentu.

3.3.5 Goals 14 (Ekosistem Lautan)

Kondisi data untuk Goals 14 di Kawasan Teluk Tomini menunjukkan bahwa hanya ada satu indikator yang dapat diakses. Enam indikator lainnya tidak memiliki data yang tersedia. Di samping itu, ada delapan indikator yang belum diproses, termasuk data untuk indikator yang digabungkan secara nasional dan indikator global yang sedang dalam pengembangan.

3.3.6 Goals 15 (Ekosistem Daratan)

Misi 15 dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan (SDG) bertujuan untuk menjaga, memperbaiki, dan meningkatkan manajemen ekosistem daratan secara berkelanjutan. Fokusnya termasuk dalam pengelolaan hutan yang lestari, menghentikan degradasi lahan, menghentikan proses gurunisasi, serta memulihkan lahan yang telah terdegradasi, sambil berupaya untuk menghentikan penurunan keanekaragaman hayati. Terdapat sebanyak 12 target dan 21 indikator yang meliputi Misi 15 dalam SDG ini.

Di Sulawesi Tengah, terjadi penurunan pada Indikator 14.b.1(b), yang mengindikasikan belum tercapainya target nasional untuk meningkatkan akses pendanaan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil. Hanya tiga indikator yang telah diteliti secara mendalam, yaitu indikator 15.1.1*, 15.1.2a, dan 15.3.1*, yang mewakili analisis data tingkat provinsi. Sisanya, ada 18 indikator lain yang tidak diperiksa, termasuk 10 indikator untuk analisis data tingkat nasional dan 8 indikator global yang telah dikembangkan.

Proporsi luas hutan terhadap total luas lahan di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan signifikan sebesar 95%, mencapai 63,62% pada Tahun 2020 dari sebelumnya 63,4%. Data ini menunjukkan bahwa proporsi tersebut telah stabil hingga Tahun 2020.

3.4 Pilar Hukum dan Tata Kelola

Ketersediaan data dan kategori proyeksi pencapaian target TPB/SDGs Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Provinsi Sulawesi Tengah. Terlihat dari Gambar 3.10 bahwa terdapat 19 indikator yang belum memiliki data, sedangkan pada 2 indikator, meskipun terdapat data, namun tidak disertakan target dalam Perpres no.111/2022 sehingga proyeksi pencapaian indikator ini tidak dapat dikategorikan. Pada proyeksi tahun 2030, 2 indikator tersebut masuk dalam kategori A, yaitu 16.9.1* (Proporsi anak di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut

umur) dan 16.9.1.(b) (Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun). Tabel 3.14 memberikan rincian pencapaian indikator TPB/SDGs Pilar Hukum dan Tata Kelola, proyeksinya hingga tahun 2030, serta kategorinya untuk Provinsi Sulawesi Tengah.

Ketersediaan data dan proyeksi kategori pencapaian target TPB/SDGs Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kabupaten Banggai menunjukkan bahwa hanya satu indikator yang memiliki data, namun tidak memiliki target yang ditetapkan oleh Perpres no.111/2022, sehingga pencapaian indikator ini tidak dapat diberikan kategori. Sementara itu, 13 indikator lainnya masih belum memiliki data (Wolok et al., 2023).

3.5 Hasil Pemetaan Kategori Capaian Indikator SDGs (Berdasarkan SDGs Tahap 1)

A. Pilar Sosial

Adapun indikator dalam pilar sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini (Yunginger et al., 2023).

Tabel 4.1 Indikator Pilar Sosial

No. Indikator	Indikator	Target Perpres 111/2022 (Target 2024)	Daerah Penelitian di Kawasan Teluk Tomini	Kondisi Capaian		Proyeksi Capaian		Status Capaian (%)	Kategori
				Tahun 2017	Tahun 2020	Tahun 2024	Tahun 2030		
1.1.1	Kemiskinan Ekstrim	Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 6,0-7,0%. Tahun dasar September 2020:10,19% (Sumber data : Survei Sosial Ekonomi Nasional)	Banggai	33,50	28,16	22,23	12,74	27	E
1.2.1*	Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 6,0-7,0%. Tahun dasar September 2020:10,19% (Sumber data : Survei Sosial Ekonomi Nasional)	BANGGAI	9.20	7.39	4.70	1.38	100	A
1.2.2*	KESEHATAN-Imunisasi Dasar berdasarkan data BPS	90%	Banggai	97.20	95.30	95.96	92.67	106.62	A

1.2.2*	PENDIDIKAN - Harapan Lama Sekolah	99%	Banggai	12.89	13.24	13.81	14.58	93.32	B
1.2.2*	PENDIDIKAN – Rata-rata Lama Sekolah	98%	Banggai	7.93	12.24	15.79	22.59	50.22	D

Indikator yang mendapatkan nilai D dan E telah masuk ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pemerintah kabupaten Banggai, menjadi bagian dari evaluasi dan monitoring kinerja pemerintahan di wilayah tersebut. Diantaranya indikator Kemiskinan Ekstrem, dan rata-rata lama sekolah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk pencapaian target masyarakat miskin sebesar 5%, garis kemiskinan pada kabupaten Banggai adalah Rp. 538.797, rata-rata lama sekolah dengan target indeks gini 0.277 pada akhir 2026.

B.Pilar Ekonomi

Adapun indikator dalam pilar Ekonomi dapat dilihat pada tabel dibawah ini (Arham et al., 2023).

Tabel 4.2 Indikator Pilar Ekonomi

No. Indikator	Indikator	Target Perpres 111/2022 (Target 2024)	Daerah Penelitian di Kawasan Teluk Tomini	Kondisi Capaian		Proyeksi Capaian		Status Capaian (%)	Kategori
				Tahun 2017	Tahun 2020	Tahun 2024	Tahun 2030		
8.1.1*	Laju Pertumbuhan PDB per Kapita (%)		Banggai	12.44	3.60	9.55	9.55	-	A
8.1.1(a)	PDB per Kapita (USD)	Meningkat menjadi USD 5.810 – 6.000	Banggai	13.888.36	17.699.07	20.534.73	52.208.03	-	A

No. Indikator	Indikator	Target Perpres 111/2022 (Target 2024)	Daerah Penelitian di Kawasan Teluk Tomini	Kondisi Capaian		Proyeksi Capaian		Status Capaian (%)	Kategori
				Tahun 2017	Tahun 2020	Tahun 2024	Tahun 2030		
9.2.1(a)	Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	Meningkat menjadi 8.1%	Banggai (IKD)	10,42	-2,35	5,54	5,56	Capaian tahun 2020 adalah - 10.79	D
10.1.1(a)	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur (%)	Menurun menjadi 8.5 – 9.0%	Banggai (IKD)	9.20%	7.83%	6.99%	6.35%		D
17.1.1*	Total Pendapatan Pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB	Meningkat 11,4 – 12%	Banggai (IKD)	8,24%	6,22%	5,70%	5,08%		E
17.1.1(a)	Rasio Penerimaan Pajak	Meningkat 8,41 – 8,87%	Banggai (IKD)	0,18%	0,18%	0,18%	0,20%		E

No. Indikator	Indikator	Target Perpres 111/2022 (Target 2024)	Daerah Penelitian di Kawasan Teluk Tomini	Kondisi Capaian		Proyeksi Capaian		Status Capaian (%)	Kategori
				Tahun 2017	Tahun 2020	Tahun 2024	Tahun 2030		
	Terhadap PDB								
17.1.2*	Proporsi anggaran domestic yang didanai pajak domestic	Meningkat	Banggai	2.32%	3.11%	3.93%	6.25%		

Indikator yang mendapatkan nilai D, dan E telah masuk ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pemerintah Banggai, menjadi bagian dari evaluasi dan monitoring kinerja pemerintahan di wilayah tersebut. Diantaranya indikator Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur, persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur, Total Pendapatan Pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB, dan Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB.

C. Pilar Lingkungan

Adapun indikator dalam pilar Lingkungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini (Lihawa et al., 2023).

Tabel 4.3 Indikator Pilar Lingkungan

No. Indikator	Indikator	Target Perpres 111/2022 (Target 2024)	Daerah Penelitian di Kawasan Teluk Tomini	Kondisi Capaian		Proyeksi Capaian		Status Capaian (%)	Kategori
				Tahun 2017	Tahun 2020	Tahun 2024	Tahun 2030		
Indikator 6.2.1(c)	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	100%	Banggai		99.9%	100%	100%		A
Indikator 6.2.1(c)	Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan sembarangan (BABS) di Tempat Terbuka	0%	Banggai		6.82%	0.1%	0%		A
Indikator 6.2.1(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALDT)	100%	Banggai		93/18%	100%	100%		A

No. Indikator	Indikator	Target Perpres 111/2022 (Target 2024)	Daerah Penelitian di Kawasan Teluk Tomini	Kondisi Capaian		Proyeksi Capaian		Status Capaian (%)	Kategori
				Tahun 2017	Tahun 2020	Tahun 2024	Tahun 2030		
Indikator 6.4.2(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya (m ³ /detik)	100%	Banggai		173	173	173		A
Indikator 11.1.1(a)	Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Meningkat menjadi 80%	Banggai		93.14%	94.13%	99.84%		A
Indikator 12.4.2*	Limbah B3 yang dihasilkan per kapita	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 539.8 juta ton (kumulatif)	Banggai		68.787.5	69.994.9	72.473.6		Meningkat
Indikator 13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Maksimal sebesar 0.2 per 100.000 jiwa setiap tahunnya	Banggai	0.001	0.004	-	-		A

D. Pilar Hukum dan Tata Kelola

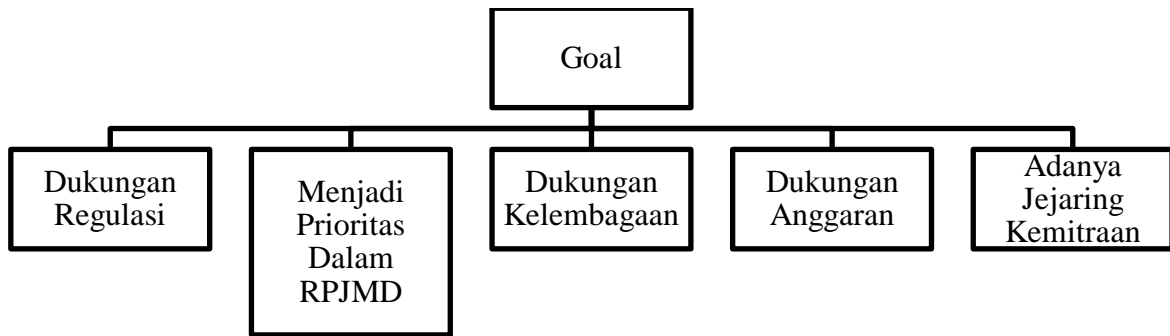
Diperlukan keberadaan basis data TPB/SDGs yang dapat diakses dengan baik dan selalu diperbarui agar integrasi indikator TPB/SDGs dalam perencanaan pembangunan dapat berjalan lancar dan menjadi dasar dalam menentukan program-program kerja pemerintah daerah yang lebih presisi.

Penting bagi BPS provinsi dan kabupaten/kota untuk mempertimbangkan perluasan jangkauan pengumpulan data sesuai dengan metadata TPB/SDGs. Perlunya peraturan terkait penerbitan basis data TPB/SDGs yang terintegrasi, baik dalam bentuk daring maupun luring, karena saat ini masih terdapat ketidakseragaman dalam disagregasi data TPB/SDGs dan hasil yang diperoleh.

BAB IV ANALISIS HIERARCHY PROCESS

4.1 Hasil Pemetaan berdasarkan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP)

Analisis Hirarki Proses (AHP) adalah suatu teknik untuk pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria, yang awalnya dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Metode ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan yang kompleks dengan membaginya menjadi serangkaian langkah yang terorganisir secara berurutan. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses AHP:



Gambar 4.2 Hierarki Pemilihan Keputusan

A. Penyusunan Matriks Perbandingan Berpasangan

Tabel 4.4 Matriks Perbandingan Berpasangan

Kriteria	Regulasi	RPJMD	Kelembagaan	Anggaran	Kemitraan
Regulasi	1.00	0.13	3.00	0.20	0.33
RPJMD	8.00	1.00	8.00	5.00	4.00
Kelembagaan	0.33	0.13	1.00	0.13	0.13
Anggaran	5.00	0.20	8.00	1.00	3.00
Kemitraan	3.00	0.25	8.00	0.33	1.00

B. Penjumlahan Matriks

Setiap nilai Menghitung total nilai dalam setiap kolom pada matriks perbandingan berpasangan sebagaimana diperlihatkan dalam persamaan berikut:

$$n = \sum_i^z = 0^{xij}$$

Keterangan :

n = Hasil penjumlahan tiap Kolom

z = Banyaknya alternatif

i = 1, 2, 3, ... z

x = nilai tiap cell / gabungan antara kolom dan baris

$$n = 1 + 8 + 0.33 + 5 + 3 = 17.33 \dots \text{dst.}$$

Hasil penjumlahan nilai dari setiap kolom pada matriks perbandingan berpasangan :

Tabel 4.5 Penjumlahan Matriks

Kriteria	Regulasi	RPJMD	Kelembagaan	Anggaran	Kemitraan
Regulasi	1.00	0.13	3.00	0.20	0.33
RPJMD	8.00	1.00	8.00	5.00	4.00
Kelembagaan	0.33	0.13	1.00	0.13	0.13
Anggaran	5.00	0.20	8.00	1.00	3.00
Kemitraan	3.00	0.25	8.00	0.33	1.00
n	17.33	1.70	28.00	6.66	8.46

C. Normalisasi Matriks

Membagi setiap nilai kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks yang ditunjukkan pada persamaan dibawah ini.

$$m = \frac{x_{ij}}{n}$$

Keterangan :

m = hasil normalisasi

x = nilai tiap cell /gabungan antara baris dan kolom

n = hasil jumlah tiap kolom

$$m = \frac{1}{17.33} = 0.06 \dots \text{dst.}$$

Hasil penjumlahan nilai dari setiap kolom pada matriks perbandingan berpasangan:

Tabel 4.6 Normalisasi Matriks

Kriteria	Regulas i	RPJM D	Kelembagaa n	Anggara n	Kemitraa n
Regulasi	0.06	0.07	0.11	0.03	0.04
RPJMD	0.46	0.59	0.29	0.75	0.47
Kelembagaa n	0.02	0.07	0.04	0.02	0.01
Anggaran	0.29	0.12	0.29	0.15	0.35
Kemitraan	0.17	0.15	0.29	0.05	0.12

D. Menghitung Nilai Bobot Prioritas

Menghitung total nilai dari setiap baris dan membagi hasil penjumlahannya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata atau bobot prioritas, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan di bawah ini.

$$bp = \frac{\sum_{j=1}^n x_{ij}}{n}$$

Keterangan :

bp = hasil rata-rata / bobot prioritas

n = banyaknya kriteria

j = 1, 2, 3, ... n

x = nilai tiap cell / gabungan antara baris dan kolom

$$bp = \frac{0.06+0.07+0.11+0.03+0.04}{5} = 0.06 \dots \text{dst.}$$

Hasil penjumlahan baris dibagi dengan jumlah elemen atau jumlah kriteria mendapatkan Bobot Prioritas.

Tabel 4.7 Bobot Prioritas

Kriteria	Bobot
Regulasi	0.06
RPJMD	0.51
Kelembagaan	0.03
Anggaran	0.24
Kemitraan	0.15
N	1

E. Menghitung Nilai Eigen

1. Kalikan nilai setiap sel pada kolom pertama dengan bobot prioritas pertama, kalikan nilai sel pada kolom kedua dengan prioritas kedua, dan lakukan hal serupa untuk sel-sel berikutnya.

Kolom Regulasi : $1 \times 0.06 = 0.06 \dots \text{dst.}$

Tabel 4.8 Perkalian setiap nilai cell dengan bobot prioritas

Kriteria	Regulasi	RPJMD	Kelembagaan	Anggaran	Kemitraan
Regulasi	0.06	0.06	0.10	0.05	0.05
RPJMD	0.49	0.51	0.26	1.20	0.62
Kelembagaan	0.02	0.06	0.03	0.03	0.02
Anggaran	0.31	0.10	0.26	0.24	0.46
Kemitraan	0.18	0.13	0.26	0.08	0.15

2. Jumlahkan hasilnya untuk setiap baris pada matriks.

Baris Regulasi : $0.06+0.06+0.10+0.05+0.05 = 0.32 \dots \text{dst.}$

Tabel 4.9 Hasil penjumlahan setiap baris

Kriteria	Regulasi	RPJMD	Kelembagaan	Anggaran	Kemitraan	Jumlah
Regulasi	0.06	0.06	0.10	0.05	0.05	0.32
RPJMD	0.49	0.51	0.26	1.20	0.62	3.08
Kelembagaan	0.02	0.06	0.03	0.03	0.02	0.17

Kriteria	Regulasi	RPJMD	Kelembagaan	Anggaran	Kemitraan	Jumlah
Anggaran	0.31	0.10	0.26	0.24	0.46	1.37
Kemitraan	0.18	0.13	0.26	0.08	0.15	0.81

3. Hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas yang bersangkutan. Baris Regulasi = $0.32/0.06 = 5.32\dots$ dst.

Tabel 4.10 Hasil Penjumlahan Baris Dibagi Dengan Elemen Prioritas Baris

Kriteria	Jumlah	Bobot Prioritas	λ
Regulasi	0.32	0.06	5.23
RPJMD	3.08	0.51	6.02
Kelembagaan	0.17	0.03	5.13
Anggaran	1.37	0.24	5.74
Kemitraan	0.81	0.15	5.21

4. Jumlahkan hasil lambda dari setiap kriteria, bagi dengan jumlah elemen yang ada, dan hasilnya disebut λ_{maks} sebagaimana ditunjukkan dalam persamaan berikut

$$\lambda_{maks} = \frac{\sum \lambda}{n}$$

Keterangan :

λ_{maks} = eigen maksimum

n = banyaknya kriteria

$$\lambda_{maks} = \frac{5.23+6.02+5.13+5.74+5.21}{5} = 5.47$$

5. Menghitung Consistensi Ratio (CR)

$$CI = \frac{\lambda_{maks} - n}{n - 1}$$

Keterangan :

n = banyak elemen

$$CI = \frac{5.47-5}{5-1} = 0.12$$

6. Melakukan perhitungan untuk mendapatkan Rasio Konsistensi atau Consistency Ratio (CR) sebagaimana terlihat dalam persamaan di bawah ini.

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Keterangan :

RI = random indeks

CR = rasio konsistensi

Tabel 4.11 Nilai Indeks Random

Ukuran Matriks (N)	Nilai RI	Ukuran Matriks (N)	Nilai RI
1, 2	0	9	1.45
3	0.58	10	1.49
4	0.90	11	1.51
5	1.12	12	1.48
6	1.24	13	1.56
7	1.32	14	1.57
8	1.41	15	1.9

$$CR = \frac{0.12}{1.12} = 0.1$$

- Melakukan evaluasi konsistensi hirarki; jika nilai CR melebihi 0,1, maka penilaian data judgment dianggap tidak konsisten dan perlu diperbaiki. Sebaliknya, jika rasio konsistensi CR kurang dari atau sama dengan 0,1, maka perhitungan data dianggap konsisten dan akurat.

CR = 0.1 atau ≤ 0.1 maka data konsisten dan akurat.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil AHP yang menunjukkan bahwa RPJMD memiliki bobot prioritas yang lebih tinggi daripada anggaran, maka rekomendasi untuk pemerintah kabupaten Banggai adalah sebagai berikut:

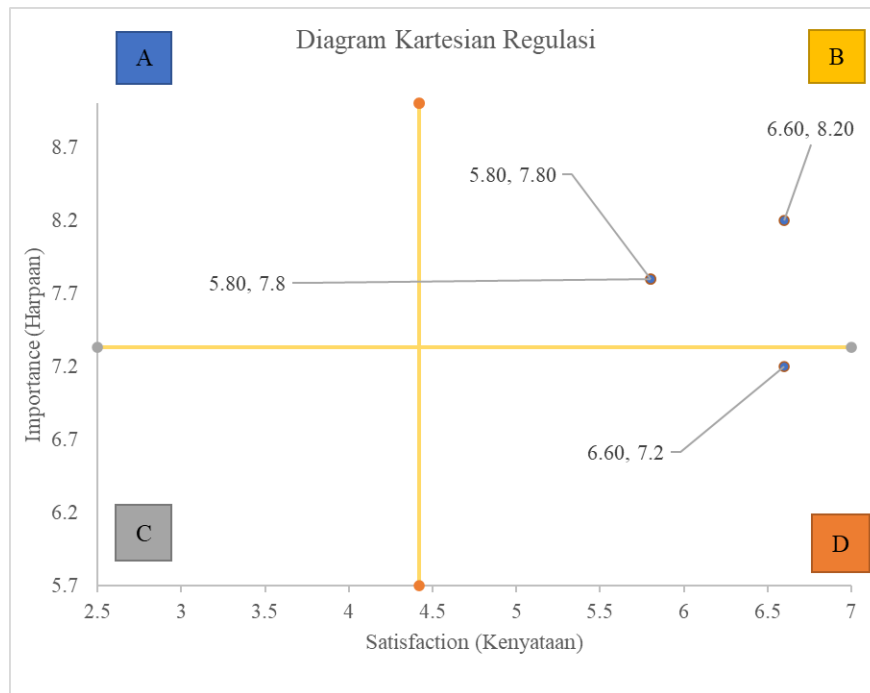
- Fokuskan pada Penyusunan dan Implementasi RPJMD: Pemerintah Kabupaten Banggai seharusnya memberikan perhatian utama pada penyusunan dan implementasi RPJMD yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). RPJMD harus menjadi pedoman utama dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar terjamin kesinambungan dan keselarasan dengan agenda pembangunan nasional serta pencapaian SDGs.
- Integrasi Indikator SDGs dalam RPJMD: Indikator SDGs yang mendapatkan predikat C, D, dan E harus dimasukkan dalam RPJMD sebagai prioritas utama. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program atau kegiatan yang direncanakan dalam RPJMD sejalan dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- Dukungan Penganggaran: Pemerintah Kabupaten Banggai juga perlu memastikan bahwa anggaran yang diperuntukkan untuk pelaksanaan RPJMD mencakup

kebutuhan untuk mendukung indikator SDGs yang telah ditetapkan. Penganggaran yang memadai dan tepat sasaran akan memastikan kelancaran implementasi program-program yang terkait dengan SDGs.

- Kolaborasi dan Kemitraan: Pemerintah Kabupaten Banggai dapat menggandeng berbagai pihak, termasuk sektor swasta, lembaga akademis, dan masyarakat sipil, dalam penyusunan dan pelaksanaan RPJMD serta pengalokasian anggaran yang mendukung pencapaian SDGs. Kolaborasi ini akan memperluas sumber daya dan pengetahuan yang tersedia serta meningkatkan efektivitas program-program pembangunan. Rasio gini kabupaten Banggai sudah baik, hal ini ditandai dengan posisi rasio gini kabupaten Banggai masih lebih baik dibandingkan dengan Rasio Gini Provinsi dan Nasional, namun hal ini harus tetap diberikan perhatian sehingga angka gini rasio menjadi nol.

BAB V IMPORTANT PERFORMANCE ANALYSIS

5.1 Pengolahan Kartesian IPA



Gambar 4.2 Diagram Kartesian

Di dalam diagram kartesius (Gambar 4.2), tergambar nilai rata-rata tingkat kepentingan terhadap posisi kuadran kartesius dimensi pada pemerintah Kota Banggai sebagai berikut :

1. Kuadran A

Kuadran A mengindikasikan dimensi-dimensi yang dianggap sangat relevan oleh pelanggan, namun implementasinya dinilai kurang memuaskan atau tidak sesuai dengan harapan para responden.

2. Kuadran B

Sementara pada kuadran B, para responden menilai dimensi-dimensi di dalamnya sangat penting dan memuaskan, sehingga dianggap perlu untuk dipertahankan. Beberapa dimensi tersebut meliputi:

- (2) Peningkatan cakupan imunisasi dasar (5.80 – 7.80)
- (3) Penurunan ketimpangan / gini ratio (6.60 – 8.20)
- (4) Peningkatan Pajak Daerah (5.80 – 7.8)

3. Kuadran C

Kuadran C menampilkan beberapa dimensi yang dianggap kurang penting dan tidak memuaskan, sehingga responden meresponsnya dengan sikap yang biasa-biasa saja.

4. Kuadran D

Pada kuadran terakhir, yakni kuadran D, dimensi-dimensi tersebut dianggap kurang penting, namun kinerjanya sangat memuaskan. Dimensi-dimensi yang terdapat dalam kuadran D yakni (1) Pengurangan tingkat kemiskinan (6.60 – 7.2)

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil Analisis IPA, di mana tiga dimensi masuk dalam kuadran B (penting dan memuaskan) dan satu dimensi masuk dalam kuadran D (kurang penting tetapi memuaskan), berikut adalah rekomendasi untuk pemerintah kabupaten Banggai:

- 1) Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar dan Penurunan Ketimpangan:
 - Prioritaskan upaya untuk terus meningkatkan cakupan imunisasi dasar di seluruh wilayah Kabupaten Banggai. Ini dapat dilakukan melalui program-program penyuluhan, kampanye sosialisasi, dan peningkatan aksesibilitas layanan imunisasi.
 - Lanjutkan upaya untuk menurunkan tingkat ketimpangan atau Gini ratio di Kabupaten Banggai. Perhatikan distribusi sumber daya yang lebih merata dan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan.
- 2) Peningkatan Pajak Daerah:
 - Perluasan basis pajak daerah serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak akan mendukung peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Banggai harus terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak yang diterapkan untuk memastikan optimalisasi pendapatan daerah.
- 3) Pengurangan Tingkat Kemiskinan:
 - Meskipun dimensi ini masuk dalam kuadran D, langkah-langkah untuk mengurangi tingkat kemiskinan tetap perlu diperhatikan. Pemerintah Kabupaten Banggai harus terus melakukan program-program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.
- 4) Evaluasi dan Peningkatan Kebijakan:
 - Terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan dalam ketiga dimensi tersebut. Identifikasi area-area yang masih memerlukan perbaikan atau peningkatan, serta terapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian yang diolah menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan *Importance Performance Analysis* (IPA), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil dari AHP menyatakan terdapat 2 bobot prioritas yang pertama ialah RPJMD dengan nilai bobot 0.51, sedangkan prioritas yang kedua ialah ANGGARAN dengan nilai bobot 0.24. hal ini dimaksudkan bahwa setiap indikator SDGs yang mendapatkan predikat C, D dan E sebaiknya dimasukkan dalam RPJMD serta didukung oleh penganggaran oleh pemerintah kabupaten Banggai.
2. Analisis IPA menunjukkan bahwa dalam kartesius IPA terdapat 3 Dimensi yang masuk pada kuadran B dimana kuadran tersebut merupakan dimensi yang sangat penting dan memuaskan bagi responden, yakni diantaranya peningkatan cakupan imunisasi dasar, penurunan ketimpangan/gini ratio, serta peningkatan pajak daerah. 1 dimensi lainnya masuk pada kuadran D dimana dimensi-dimensi yang masuk pada kuadran tersebut dianggap kurang penting, namun kinerjanya sangat memuaskan dimensi yang dimaksud ialah pengurangan tingkat kemiskinan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Banggai:

1. Pengintegrasian RPJMD dengan Indikator SDGs Predikat C, D, dan E:
 - a) Penyusunan Kebijakan Berbasis RPJMD: Melakukan penyusunan kebijakan yang memprioritaskan indikator SDGs yang mendapatkan predikat C, D, dan E untuk dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini memastikan bahwa upaya pencapaian target SDGs menjadi bagian integral dari agenda pembangunan jangka menengah daerah. Misalnya dengan melakukan penyusunan program-program unggulan dalam RPJMD yang secara spesifik menargetkan pencapaian indikator SDGs yang mendapat predikat C, D, dan E, seperti peningkatan akses air bersih bagi masyarakat di pedesaan atau peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
 - b) Pengalokasian Anggaran yang Tepat: Mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk mendukung implementasi kebijakan yang tercantum dalam RPJMD. Anggaran yang memadai sangat penting untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan

program-program pembangunan yang bertujuan untuk mencapai target-target SDGs. Misalnya dengan memberikan alokasi anggaran yang signifikan untuk mendukung implementasi program-program tersebut, termasuk untuk penyediaan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan penguatan institusi terkait.

2. Optimalisasi Dimensi Kuadran B dan Perhatikan Dimensi Kuadran D:

- a) Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar: Melakukan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar di wilayah Kabupaten Banggai, seperti penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi, peningkatan akses terhadap layanan imunisasi, dan monitoring yang ketat terhadap pelaksanaan program imunisasi. Misalnya dengan mengadakan kegiatan imunisasi massal di berbagai desa atau kelurahan, dilengkapi dengan kampanye penyuluhan tentang pentingnya imunisasi bagi kesehatan anak-anak.
- b) Pengurangan Ketimpangan/Gini Ratio: Mengembangkan program-program yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara kelompok masyarakat, seperti program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan, penguatan sistem redistribusi pendapatan, dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan. Misalnya dengan meluncurkan program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat, bantuan modal usaha bagi kelompok masyarakat miskin, dan pembukaan akses pasar bagi produk-produk lokal.
- c) Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah: Melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah, seperti membenahan sistem perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Misalnya dengan memulai reformasi perpajakan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menyederhanakan proses perpajakan, dan memperketat pengawasan terhadap potensi-potensi pelanggaran perpajakan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan Pemerintah Kabupaten Banggai dapat lebih efektif dalam mencapai target-target pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Agenda 2030 SDGs, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. (2016). Perencanaan Strategi Pemasaran Dengan Pendekatan Bauran Pemasaran Dan SWOT Pada Perusahaan POPSY TUBBY. *Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis*, 1, 297–306.
- Arham, M. A., Payu, B. R., Tantawi, R., Kusuma, C. A., Panigoro, N., & Toralawe, Y. (2023). *Potret Awal Pencapaian SDGs Pilar Ekonomi Di Kawasan Teluk Tomini* (T. Media (ed.); 1st ed., Vol. 01). Tahta Media.
- Lihawa, F., Koniyo, Y., Arifin, S. S., Mahmud, M., Maryati, S., Juliana, Koniyo, H., Syukri, M. R., & Masruroh. (2023). *PILAR LINGKUNGAN DI KAWASAN TELUK TOMINI : Potret Awal Pencapaian SDGs* (1st ed.).
- Nusaputra, N., Choiri, M., & Kusuma, L. T. W. N. (2014). ANALISIS PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BENGKEL DENGAN METODE SERVQUAL , IPA , DAN INDEKS PGCV (Studi Kasus di PT . Astra International Tbk-Daihatsu Branch Office Malang) ANALYSIS OF QUALITY IMPROVEMENT SERVICES WORKSHOP BY USING SERVQUAL , IPA , AND PG. *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Industri Vol. 2 No. 6 Teknik Industri Universitas Brawijaya Analisis*, 2(6), 1239–1250.
- Osuna, E. E., & Aranda, A. (2007). Combining SWOT and AHP Techniques For Strategic Planning. *Isahp*, 1–8.
- Rangkuti, F. (2009). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Saprudin, U. (2020). Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Dan Simple Additive Weighting (SAW) Dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Bibit Cabai Merah Unggul. *JSI: Jurnal Sistem Informasi (E-Journal)*, 12(1). <https://doi.org/10.36706/jsi.v12i1.9585>
- Slamet, & Sukma Nurhidayah, L. (2023). EVALUASI KINERJA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI: PENDEKATAN METODE IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7, 175–197.
- Thomas Lorie, S. (1993). *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, Proses Hirarki Analitik Untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks* (Seri Manaj). Pustaka Binama Pressindo.
- Tjiptono, F., & Chandra, G. (2016). *Service, Quality and Satisfaction* (4th ed.). CV. Andi Offset.
- Wolok, E., Lahay, I. H., & Ridwan, W. (2023). *PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA : Strategi Percepatan Pencapaian SDGs Teluk Tomini* (N. Harun (ed.); 1st ed., Vol. 01). CV. Arta Media.
- Yunginger, R., Kandowangko, N. Y., Supu, I., Supartin, Amali, L. N., Amalia, L., Papeo, D. R. P., & Dama, M. (2023). *Portret Awal Pencapaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial Di Kawasan Teluk Tomini* (T. Media (ed.); 1st ed.). Cv. Tahta Media Group.

LAMPIRAN.